

**LAPORAN PELAKSANAAN  
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG  
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN 2024**



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara 2023- 2027**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Fajar Mentari, S.Pd., C. Med	Ketua
2	Niko Ruru, S.P., C. Med	Wakil Ketua
3	Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med	Anggota Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi
4	Mohammad Isya, S.H., C. Med	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
5	Siti Nuhriyati, S.E.,M.Si., C. Med	Anggota Bidang Kelembagaan

## Kata Pengantar

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara telah menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tahun Tahun 2024.

Laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Gubernur Kalimantan Utara maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini, sekaligus merupakan pertanggungjawaban Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara kepada publik di daerah ini.

Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan, Komisi Informasi provinsi bertanggungjawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.

Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Secara rinci, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara bertugas menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara berwenang menyelesaikan sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dengan memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa, meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik, mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tahun Tahun 2024, tentu diharapkan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Utara, Dr Drs H Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum maupun Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara, yang telah mendukung Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sehingga dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya. Meskipun diakui, masih banyak kekurangan yang harus dibenahi untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi di Kalimantan Utara.

Semoga semua yang telah kita lakukan berkontribusi besar terhadap keterbukaan informasi publik, yang bermuara pada terwujudnya *good governance* di Kalimantan Utara. Semoga pula, amal baik kita semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tanjung Selor, 1 Maret 2025

Komisi Informasi Provinsi  
Kalimantan Utara  
Ketua,



**Fajar Mentari, S.Pd**

## DAFTAR ISI

Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara 2023- 2027 .....	2
Kata Pengantar.....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>7</b>
<b>1.1 Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara .....</b>	<b>7</b>
1.1.1 Kondisi Geografis .....	7
1.1.2 Pemerintahan .....	8
1.1.3 Kependudukan .....	9
1.1.4 Sosial dan Kesejahteraan Rakyat .....	10
1.1.5 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan .....	13
1.1.6 Pertambangan dan Energi.....	15
1.1.7 Industri Manufaktur.....	15
1.1.8 Pariwisata .....	15
1.1.9 Transportasi dan Komunikasi.....	16
1.1.10 Perbankan, Koperasi dan Harga- Harga .....	17
1.1.11 Pengeluaran Penduduk .....	18
1.1.12 Perdagangan Luar Negeri.....	18
1.1.13 Sistem Neraca Nasional.....	19
1.1.14 Perbandingan Antar Provinsi .....	20
<b>1.2 Capaian Provinsi dari Berbagai Indeks.....</b>	<b>21</b>
1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	21
1.2.2 Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) .....	21
1.2.3 Indeks Demokrasi Indonesia .....	22
1.2.4 Indeks Kebebasan Pers .....	22
1.2.5 Survei Penilaian Integritas .....	23
1.2.6 Indeks Kebahagiaan .....	23
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>24</b>
<b>2.1 Sasaran Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 ...</b>	<b>24</b>
<b>2.2 Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 .....</b>	<b>24</b>
2.2.1 Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.....	24
2.2.2 Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota .....	27
2.2.3 Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan.....	34
<b>BAB III PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG .....</b>	<b>37</b>

<b>3.1 Gambaran Umum Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara .....</b>	<b>37</b>
<b>3.1.1 Pendahuluan .....</b>	<b>37</b>
<b>3.1.2 Dukungan Anggaran .....</b>	<b>37</b>
<b>3.1.2 Uraian Fungsi, Tugas dan Wewenang .....</b>	<b>38</b>
<b>3.2 Rencana Strategis 2024- 2029 .....</b>	<b>41</b>
<b>3.3 Pelaksanaan Program Prioritas .....</b>	<b>43</b>
<b>3.4 Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi .....</b>	<b>46</b>
<b>3.5 Bidang Kelembagaan .....</b>	<b>49</b>
<b>3.6 Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
<b>4.1 Hambatan- Hambatan .....</b>	<b>55</b>
<b>4.2 Kesimpulan .....</b>	<b>55</b>
<b>4.2 Rekomendasi .....</b>	<b>55</b>
<b>Lampiran : Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Januari- Desember 2024.....</b>	<b>56</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara**

#### **1.1.1 Kondisi Geografis**

##### **Geografi**

Provinsi Kalimantan Utara merupakan sebuah provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki luas  $\pm 70.101,00 \text{ km}^2$ , terletak pada posisi antara  $114^{\circ}.35'22''$ – $118^{\circ}.03'00''$  bujur timur dan  $1^{\circ}.21'36''$ – $4^{\circ}.24'55''$  lintang utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Kalimantan Utara memiliki batas-batas:

Utara– Negara Sabah (Malaysia);

Selatan– Provinsi Kalimantan Timur;

Barat– Negara Serawak (Malaysia);

Timur–Laut Sulawesi.

Akhir tahun 2022, wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 (lima) Kabupaten/Kota, dengan luas daratan masing-masing Kabupaten/Kota, yaitu:

Kabupaten Malinau ( $38.902 \text{ km}^2$ ),

Kabupaten Bulungan ( $13.880 \text{ km}^2$ ),

Kabupaten Tana Tidung ( $3.504 \text{ km}^2$ ),

Kabupaten Nunukan ( $13.564 \text{ km}^2$ ),

Kota Tarakan ( $251 \text{ km}^2$ )

Berdasarkan jumlah Pulau, Provinsi Kalimantan Utara memiliki 196 pulau yang tersebar di beberapa Kabupaten/ Kota. 58,67 persen pulau yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dimiliki oleh Kabupaten Bulungan. Ibukota dari Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Bulungan. Ibukota masing-masing Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Malinau: Malinau Kota.
2. Kabupaten Bulungan: Tanjung Selor.
3. Kabupaten Tana Tidung: Tideng Pale.
4. Kabupaten Nunukan: Nunukan.
5. Kota Tarakan: Tarakan

Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten terjauh yang berada di Provinsi Kalimantan Utara dengan jarak ke ibukota provinsi adalah 245,70 km. Kabupaten terjauh kedua dan ketiga adalah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung, yaitu masing- masing jarak ke ibukota provinsi adalah 192,90 km dan 146,80 km. Berdasarkan topografi wilayah, pada tahun 2023 sebanyak 4 desa/ kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara yang berada di lembah, 323 desa/ kelurahan yang berada di lereng/ puncak, dan 155 desa/kelurahan yang berada di dataran. Terdapat perbedaan angka yang cukup besar antara tahun 2023 dengan 2018, dimana pada tahun 2018 terdapat 99 desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara yang berada di lembah, 51 desa/ kelurahan yang berada di lereng/ puncak, dan 332 desa/kelurahan yang berada di dataran. Perbedaan angka antara tahun 2018 dan tahun 2023 ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan metode pengambilan data di tahun 2023.

Metode pengambilan data pada tahun 2023 yaitu dengan menggunakan data pemetaan yang diambil dari citra satelit kemudian dilakukan penyesuaian dengan kondisi daerah desa/kelurahan yang sebenarnya.

### **Iklim**

Untuk kondisi klimatologi, rata-rata suhu udara di Provinsi Kalimantan Utara pada 2023 adalah 27,83°C, dengan rata-rata titik maksimal pada 34,90°C dan rata-rata titik minimal pada 22,00°C. Rata-rata kelembaban udara di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah 83,59 persen dengan rata-rata titik maksimal pada 100,00 persen dan rata-rata titik minimal pada 39,00 persen.

Kondisi tekanan udara di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah 1.008,38 mbar dengan rata-rata kecepatan angin 3,63 m/detik. Durasi penyinaran matahari di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 5,60 persen. Untuk kondisi hujan, jumlah curah hujan di Provinsi Kalimantan Utara pada 2023 adalah 2.406,20 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan adalah 219 hari selama tahun 2023.

## **1.1.2 Pemerintahan**

### **Wilayah Administratif**

Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota. Pada tahun 2023, jumlah kecamatan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara adalah 55 kecamatan. Kabupaten Nunukan adalah kabupaten dengan jumlah kecamatan terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu 21 kecamatan.

Pada tahun 2023, jumlah desa di Provinsi Kalimantan utara adalah 484 desa/kelurahan. Dari 484 tersebut, 242 desa/kelurahan berada di Kabupaten Nunukan. Desa yang dimaksud termasuk kelurahan dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dilihat dari susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Kalimantan Utara, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2019-2024 pada tahun 2023 sebanyak 35 orang, terdiri dari 32 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Partai politik dengan jumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara terbanyak adalah Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Hati Nurani Rakyat, yaitu masing-masing 5 orang anggota DPRD (14,29 persen).

Untuk jumlah Anggota DPRD di tiap-tiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah 20 orang di Kabupaten Malinau, 25 orang di Kabupaten Bulungan, 20 orang di Kabupaten Tana Tidung, 25 orang di Kabupaten Nunukan dan 30 orang di Kota Tarakan.

### **Sumber Daya Manusia**

Pegawai Negeri Sipil Daerah di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 berjumlah 11.455 pegawai. Terjadi penurunan sebesar 40,88 persen (7.920 pegawai) jika dibandingkan dengan jumlah pegawai pada tahun sebelumnya. Dari 11.455 pegawai, 50,78 persen adalah PNS Daerah dengan jenis kelamin laki-laki. Jika



dilihat menurut kabupaten/kota, jumlah PNS Daerah terbanyak berada di Kabupaten Bulungan, yaitu 4.865 pegawai (42,47 persen). Banyaknya PNS di Kabupaten Bulungan karena di kabupaten Bulungan terdapat dua pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dari 11.455 PNS Daerah di Provinsi Kalimantan Utara, 4.865 pegawai adalah PNS Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023. Terjadi peningkatan jumlah PNS Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 9,42 persen (bertambah 419 pegawai). Dari 4.865 pegawai, 32,17 persen menduduki jabatan fungsional umum/staf. Jika dilihat menurut tingkat pendidikan, sekitar 0,41 persen PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki tingkat pendidikan sampai dengan Sekolah Dasar (SD). Namun, jumlah PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih didominasi oleh PNS dengan tingkat pendidikan sarjana/doktor, yaitu mencapai 79,59 persen.

### **Keuangan Daerah**

Angka sementara realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah 2.993.073.987,00 ribu rupiah. Terjadi kenaikan sebesar 9,58 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Dari angka sementara realisasi pendapatan di tahun 2023, 67,23 persen berasal dari dana perimbangan. Di sisi lain, angka sementara realisasi belanja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 3.188.380.768 ribu rupiah. Terjadi peningkatan sebesar 24,86 persen jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Dari realisasi belanja pada tahun 2023, 62,76 persen realisasi belanja tersebut adalah belanja langsung. Dari belanja langsung tersebut, sebesar 1.055.612.392 ribu rupiah digunakan untuk belanja barang dan jasa.

Jika dilihat menurut Kabupaten/ Kota, Kabupaten Malinau merupakan kabupaten dengan realisasi pendapatan terbesar, yaitu 2.107.709.417,23 ribu rupiah, lalu diikuti oleh Kabupaten Bulungan (1.844.714.556,65 ribu rupiah) dan Kabupaten Nunukan (1.726.747.937,82 ribu rupiah).

## **1.1.3 Kependudukan**

### **Penduduk**

Penduduk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020- 2023 (Juni) sebanyak 730,01 ribu penduduk yang terdiri dari 384,01 ribu penduduk laki-laki dan 346,00 ribu penduduk perempuan. Dari 730,01 ribu penduduk, 34,39 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kota Tarakan, dan hanya 3,76 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kabupaten Tana Tidung. Selama tahun 2022–2023, penduduk Provinsi Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan sebesar 1,44 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 111,0, yang berarti bahwa pada tahun 2023 di antara 100 penduduk perempuan, terdapat 111 penduduk laki-laki di Provinsi Kalimantan Utara.

Kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 mencapai 10 penduduk/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 5 (lima) Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Utara cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Tarakan mencapai 1.000 penduduk/km<sup>2</sup> dan terendah di Kabupaten Malinau yang hanya mencapai 2 penduduk/Km<sup>2</sup>.

### **Ketenagakerjaan**

Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 berjumlah 551.272 orang, yang terdiri dari 387.823 orang angkatan kerja dan 163.449 orang bukan angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 mencapai angka 70,35 persen dan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah 4,01 persen.

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SMA/SMK/MA sebesar 35,73 persen dan 15,05 persen adalah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan adalah SMP/MTs.

Berdasarkan kelompok umur, sebesar 13,23 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 berada pada kelompok umur 25-29 tahun, dan masih ada penduduk usia 60 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu mencapai 8,02 persen.

Sebesar 44,47 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 berstatus sebagai buruh/ karyawan/ pegawai dan sebesar 2,80 persen berstatus sebagai pekerja bebas di nonpertanian.

Rata-rata upah /gaji bersih sebulan pekerja formal di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah Rp 3.599.653,-. Pekerja formal yang dimaksud adalah buruh/karyawan/pegawai. Di Sisi lain, rata-rata pendapatan bersih sebulan pekeja informal di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah Rp 2.212.739-. Yang dimaksud pekerja informal disini adalah pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian.

## **1.1.4 Sosial dan Kesejahteraan Rakyat**

### **Pendidikan**

Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 menurut jenjang pendidikan adalah 94,73 (SD/MI); 80,53 (SMP/ MTs) dan 66,70 (SMA/SMK/MA). Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 menurut jenjang pendidikan adalah 101,5 (SD/MI); 97,60 (SMP/MTs); dan 97,78 (SMA/ SMK/ MA). APK SD/MI menunjukkan angka lebih dari 100. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat jumlah murid SD/MI yang bersekolah sebelum usia 7 tahun atau lebih dari usia 13 tahun.

Pada tahun 2023 persentase penduduk Provinsi Kalimantan Utara berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf yang tinggal di wilayah perkotaan mencapai 98,90 persen dan yang tinggal di wilayah perdesaan mencapai 95,70 persen. Secara keseluruhan, penduduk Provinsi Kalimantan Utara berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf, baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan mencapai 97,80 persen. Terjadi kenaikan 0,10 persen poin bila dibandingkan dengan angka melek huruf tahun sebelumnya.

### **Kesehatan**

Pada tahun 2023, Provinsi Kalimantan Utara memiliki beberapa fasilitas kesehatan, diantaranya: 16 rumah sakit umum, 58 puskesmas, 52 klinik pratama, dan 766 posyandu. Tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 613 dokter, 2.506 perawat, 1.490 bidan, 567 farmasi dan 134 ahli gizi. 18 dari 58 puskesmas yang ada di Provinsi Kalimantan Utara terdapat di Kabupaten Nunukan, 17 terdapat di Kabupaten Malinau, 12 terdapat di Kabupaten Bulungan, 6 terdapat di Kota Tarakan dan 5 terdapat di Kabupaten Tana Tidung.

Persentase perempuan pernah kawin berumur 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup (ALH) yang ditolong oleh tenaga kesehatan tahun 2023 adalah 98,96 persen di Provinsi Kalimantan Utara. Terjadi kenaikan sebesar 0,15 persen poin bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 persentase perempuan pernah kawin berumur 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup (ALH) ditolong oleh tenaga kesehatan adalah 98,81 persen. Sebesar 1,04 persen perempuan pernah kawin berumur 15–49 tahun melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) ditolong oleh non tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 (penurunan sebesar 0,15 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya).

Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 23,42 persen. Terjadi penurunan sebesar 11,45 persen poin bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana terdapat 34,87 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir pada tahun 2022. Dari penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan tersebut, penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan selama sebulan terakhir di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 mencapai 28,34 persen. Terjadi penurunan sebesar 9,29 persen poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi lain, masih ada penduduk yang mengalami keluhan kesehatan namun tidak berobat jalan selama sebulan terakhir di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 karena berbagai alasan. Sebesar 56,36 persen penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan tidak berobat jalan selama sebulan terakhir beralasan untuk mengobati sendiri. Lalu, 37,67 persen penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan merasa tidak perlu untuk berobat jalan selama sebulan terakhir di Provinsi Kalimantan Utara.

### **Perumahan dan Lingkungan**

Pada tahun 2023, mayoritas rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas lantai antara 50–99 m<sup>2</sup> (mencapai 44,31 persen). Sementara 0,81 persen rumah tangga memiliki luas lantai kurang dari atau sama dengan 19 m<sup>2</sup> dan

13,24 persen rumah tangga memiliki luas lantai minimal 150 m<sup>2</sup>. Berdasarkan sumber air minum, 73,76 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum rumah tangga, baik air kemasan bermerk maupun air isi ulang. 10,84 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 masih menggunakan air hujan sebagai sumber air minum rumah tangga.

Berdasarkan sumber penerangan, 95,72 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 menggunakan listrik PLN, 3,73 persen menggunakan listrik non- PLN, dan 0,54 persen rumah tangga menggunakan bukan listrik sebagai sumber penerangan. Untuk bahan bakar utama memasak, 87,13 persen rumah tangga menggunakan gas/elpiji sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Gas/elpiji di sini termasuk elpiji 5,5 kg, elpiji 12 kg, elpiji 3 kg, gas kota dan biogas.

Rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki akses terhadap sanitasi layak pada tahun 2023 mencapai 84,22 persen. Terjadi kenaikan sebesar 2,00 persen poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan akses terhadap sumber air minum layak, 90,19 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Terjadi kenaikan sebesar 0,23 persen poin jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, di mana rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak mencapai 89,96 persen di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023.

### **Kriminalitas**

Jumlah kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 1.403 kejahatan. Terjadi kenaikan jumlah kejahatan yang dilaporkan sebesar 23,29 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari 1.403 kejahatan yang dilaporkan, 37,13 persen berdasarkan laporan dari kepolisian resort Kota Tarakan.

Pada tahun 2023, penyelesaian tindak pidana di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 66,00 persen. Artinya, dari 100 tindak pidana pada tahun 2023, 66 tindak pidana berhasil diselesaikan. Terjadi penurunan sebesar 7,11 persen poin bila dibandingkan dengan tingkat penyelesaian tindak pidana pada tahun sebelumnya. Persentase penyelesaian tindak pidana tertinggi pada tahun 2023 adalah 73,0 persen oleh Kepolisian Resort Kabupaten Nunukan.

### **Agama dan Sosial Lainnya**

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara, mayoritas penduduk di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 beragama Islam, yaitu mencapai 73,36 persen. Sebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Utara menurut agama lainnya adalah 19,44 persen Kristen Protestan, 6,58 persen Kristen Katolik, 0,05 persen Hindu, 0,54 persen Buddha, 0,02 persen Khonghucu, dan 0,01 persen Kepercayaan. Jumlah tempat peribatan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah 727 masjid, 433 mushola/langgar, 784 gereja protestan, 133 gereja katolik, 3 pura, 9 vihara dan 3 klenteng.

Berdasarkan hasil pendataan potensi desa 2021, terdapat 122 desa/ kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami banjir, 16 desa/kelurahan yang mengalami gempa bumi dan 33 desa/kelurahan mengalami bencana tanah longsor. Desa/kelurahan di sini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait.

Berdasarkan data bantuan sosial dari Kementerian Sosial, jumlah realisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 135.374 keluarga dengan realisasi jumlah anggaran mencapai Rp 55.234.600.000,—.

### **Kemiskinan dan Pembangunan Manusia**

Garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019–2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pada kondisi Maret 2023, garis kemiskinan di wilayah perkotaan Provinsi Kalimantan Utara mencapai Rp 851.133,00 dan Rp 765.597,00 di wilayah perdesaan.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara kondisi Maret 2023 mencapai 47,97 ribu penduduk (6,45 persen), terdiri dari 24,75 ribu penduduk miskin di wilayah perkotaan dan 23,22 ribu penduduk miskin di wilayah perdesaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara kondisi Maret 2023 adalah 0,56 (perkotaan), 0,78 (perdesaan) dan 0,64 (perkotaan dan perdesaan). Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara kondisi Maret 2023 adalah 0,11 (perkotaan), 0,10 (perdesaan) dan 0,11 (perkotaan dan perdesaan).

## **1.1.5 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan**

### **Tanaman Pangan**

Luas panen padi di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah 6.632 hektar. Produktivitas padi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 36,71 kuintal/hektar dengan produksi padi sebesar 24.347 ton. Kualitas produksi padi ini adalah kualitas produksi gabah kering giling.

Jika dilihat menurut kabupaten/ kota, Kabupaten Bulungan memiliki luas panen padi terluas dengan 2.667 hektar dan produksi padi mencapai 10.347,73 ton. Sementara itu, Kota Tarakan memiliki luas panen terendah yaitu 11,85 hektar dengan produksi padi sebesar 47,65 ton.

### **Hortikultura**

Pada tahun 2023, terdapat beberapa jenis tanaman sayuran yang memiliki luas panen terluas di Provinsi Kalimantan Utara. Tanaman sayuran tersebut antara lain: kangkung (509 hektar), bayam (486 hektar), dan petsai (463 hektar). Adapun produksi dari masing–masing tanaman sayuran tersebut adalah tanaman kangkung mencapai 39.368 kuintal, bayam mencapai 20.573 kuintal, dan petsai mencapai 30.039 kuintal.

Untuk tanaman kangkung, produksi terbesar berada di Kota Tarakan yaitu produksi mencapai 22.320 kuintal. Untuk tanaman biofarmaka, luas panen

tanaman biofarmaka terluas di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah tanaman jahe yang mencapai 232.968 m<sup>2</sup> dengan produksi mencapai 751.656 kg. Untuk tanaman hias yang memiliki luas panen terluas di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah tanaman mawar yang mencapai 4.133 m<sup>2</sup> dengan produksi mencapai 129.640 tangkai. Untuk tanaman buah–buahan tahunan yang memiliki produksi terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah tanaman pisang yang mencapai 772.734 kuintal. Terjadi penurunan sebesar 13,72 persen produksi tanaman pisang di Provinsi Kalimantan Utara bila dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya.

### **Perkebunan**

Tanaman perkebunan yang memiliki luas areal terluas di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah kelapa sawit yang mencapai 39.466,50 hektar. Terjadi peningkatan sebesar 1,36 persen luas areal kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Utara bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk produksi kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah 75.738,90 ton. Adapun wujud produksi kelapa sawit dalam minyak sawit mentah. Luas areal terluas dan produksi kelapa sawit terbesar di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 berada di Kabupaten Nunukan, dengan luas areal mencapai 33.111,30 hektar dan produksi mencapai 66.785,40 ton kelapa sawit.

### **Kehutanan**

Pada tahun 2022, produksi kayu bulat di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 1.243.960 m<sup>3</sup>. Terjadi kenaikan produksi kayu bulat sebesar 0,21 persen bila dibandingkan dengan tahun 2021. Adapun produksi kayu lapis, kayu gergajian, dan veneer di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 masing–masing mencapai 99.228 m<sup>3</sup>, 8.676,15 m<sup>3</sup> dan 3.663 m<sup>3</sup>.

### **Peternakan**

Produksi daging babi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 505.586,41 kg, daging sapi sebesar 891.620,94 kg dan daging kambing mencapai 144.716 kg. Produksi daging sapi terbanyak berada di Kota Tarakan yang mencapai 57,24 persen (510.356 kg) dari total produksi daging sapi di Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk populasi unggas, pada tahun 2022 populasi ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging dan itik/ itik di Provinsi Kalimantan Utara berturut– turut adalah 1.117.544 ekor; 171.060 ekor; 4.356.184 ekor dan 28.903 ekor. Produksi daging ayam kampung tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 1.289.992,55 kg, daging ayam petelur mencapai 73.185,53 kg, daging ayam pedaging mencapai 5.512.539,55 kg dan produksi daging itik mencapai 22.613,37 kg.

### **Perikanan**

Produksi perikanan tangkap di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 mencapai 30.297 ton dengan nilai produksi mencapai Rp 831.611.394,–. Produksi perikanan tangkap terbesar berada di Kota Tarakan yang mencapai 55,91 persen (16.939 ton) dengan nilai produksi mencapai Rp 327.382.549,–. Produksi perikanan budidaya terbesar di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 adalah produksi rumput laut yang mencapai 788.968 ton dengan nilai

produksi mencapai Rp 2.235.808.000,—. Produksi rumput laut tersebut berada di Kabupaten Nunukan yang mencapai 587.459 ton dengan nilai produksi mencapai Rp 1.385.908.000,— dan di Kota Tarakan yang mencapai 201.509 ton dengan nilai produksi Rp 849.900.000,—.

#### **1.1.6 Pertambangan dan Energi**

Pada tahun 2023, jumlah pelanggan listrik di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 205.596 pelanggan. Terjadi peningkatan sebesar 8,34 persen pada jumlah pelanggan listrik di Provinsi Kalimantan Utara bila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya. Daya terpasang di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 360.229.350 VA. Produksi listrik di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 691.189.310 KWh, dengan jumlah listrik terjual sebesar 641.988.209 KWh, dipakai sendiri sebesar 10.651.270 KWh dan susut/hilang mencapai 38.549.831 KWh.

Jika dilihat menurut kabupaten/ kota, Kota Tarakan memiliki jumlah pelanggan listrik terbesar di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu 36,14 persen dari total jumlah pelanggan di Provinsi Kalimantan Utara (74.312 pelanggan). Kabupaten Bulungan memiliki jumlah pelanggan listrik terbesar kedua, yaitu sebesar 26,10 persen (53.670 pelanggan). Kemudian diikuti oleh Kabupaten Nunukan yang memiliki jumlah pelanggan listrik sebesar 24,08 persen (49.517 pelanggan).

#### **1.1.7 Industri Manufaktur**

##### **Industri Besar dan Sedang**

Berdasarkan hasil Survei Perusahaan Manufaktur Tahunan, pada tahun 2021, terdapat 32 perusahaan industri besar dan sedang dengan jumlah tenaga kerja mencapai 16.351 orang di Provinsi Kalimantan Utara. Jika dilihat menurut klasifikasi industri, sebesar 75,00 persen industri besar dan sedang merupakan industri makanan dan minuman. Dari 16.351 tenaga kerja pada industri besar dan sedang, sebesar 75,97 persen merupakan tenaga kerja yang bekerja di industri makanan dan minuman di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021.

Jika dilihat distribusinya menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, 53,12 persen perusahaan industri besar dan sedang berada di Kota Tarakan dengan persentase tenaga kerja industri besar dan sedang yang ada di Kota Tarakan mencapai 40,63 persen pada tahun 2021.

##### **Industri Mikro dan Kecil**

Pada tahun 2022, terdapat 5.354 perusahaan industri mikro dan kecil di Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah tenaga kerja mencapai 10.194 tenaga kerja. Dilihat menurut Kabupaten/Kota, jumlah industri mikro dan kecil terbanyak berada di Kota Tarakan (2.332 perusahaan), dengan jumlah tenaga kerja mencapai 4.677 tenaga kerja di Kota Tarakan.

#### **1.1.8 Pariwisata**

Pada tahun 2023, rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang di Provinsi Kalimantan Utara masing-masing sebesar 1,81 hari untuk tamu asing dan 1,73 hari untuk tamu domestik. Selama tahun 2023, rata-rata tertinggi untuk lama

menginap tamu asing di hotel berbintang di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada bulan Juli 2023 yang mencapai 2,85 hari. Sementara rata-rata tertinggi untuk lama menginap tamu domestik di hotel berbintang di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada bulan Januari 2023 yang mencapai 2,31 hari. Rata-rata lama menginap tamu di akomodasi lainnya di Provinsi Kalimantan Utara masing-masing sebesar 1,05 hari untuk tamu asing dan 1,52 hari untuk tamu domestik. Selama tahun 2023, rata-rata tertinggi untuk lama menginap tamu asing di akomodasi lainnya di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada bulan Juli 2023 yang mencapai 1,75 hari. Sementara rata-rata tertinggi untuk lama menginap tamu domestik di akomodasi lainnya di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada bulan Februari 2023 yang mencapai 1,73 hari.

Persentase tingkat penghunian kamar hotel berbintang pada tahun 2023 mencapai 51,66 persen. Selama tahun 2023, tingkat penghunian kamar hotel berbintang tertinggi terjadi pada bulan November 2023 yang mencapai 60,90 persen di Provinsi Kalimantan Utara. Persentase tingkat penghunian kamar hotel nonbintang pada tahun 2023 mencapai 32,29 persen. Selama tahun 2023, tingkat penghunian kamar hotel nonbintang tertinggi terjadi pada bulan November 2023 yang mencapai 36,7 persen di Provinsi Kalimantan Utara.

Pada tahun 2023, jumlah rumah makan/restoran di Provinsi Kalimantan Utara yakni sebanyak 1.262 unit. Jumlah rumah makan/restoran terbanyak terdapat di Kota Tarakan sebanyak 653 unit, Kabupaten Nunukan sebanyak 262 unit, Kabupaten Bulungan sebanyak 232 unit, Kabupaten Malinau sebanyak 64 unit, serta paling sedikit terdapat di Kabupaten Tana Tidung sebanyak 51 unit. Jumlah akomodasi, kamar dan tempat tidur yang tersedia pada hotel bintang di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 7 akomodasi, 431 kamar dan 624 tempat tidur. Jumlah akomodasi, kamar dan tempat tidur yang tersedia pada hotel bintang paling banyak terdapat di Kota Tarakan yakni akomodasi, 378 kamar dan 545 tempat tidur.

### **1.1.9 Transportasi dan Komunikasi**

#### **Transportasi**

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Untuk meningkatkan usaha pembangunan dituntut pula peningkatan pembangunan jalan guna memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Angka sementara panjang jalan kewenangan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah 851,88 km. Dirinci menurut kabupaten/kota, panjang jalan kewenangan provinsi terpanjang berada di Kabupaten Bulungan yang mencapai 410,05 km, lalu Kabupaten Nunukan dengan panjang jalan kewenangan provinsi mencapai 215,45 km dan Kabupaten Malinau mencapai 111,82 km.

Total panjang jalan kewenangan provinsi mencapai 851,88 km. Dari 851,88 km tersebut, 13,73 persen merupakan jalan aspal, 1,35 persen jalan beton, 9,88 persen jalan kerikil dan 75,04 persen merupakan jalan tanah. Jika dilihat menurut kondisi jalan, 12,67 persen merupakan jalan dengan kondisi baik, 1,28 persen



kondisi sedang, 0,55 persen kondisi rusak ringan dan 85,51 persen merupakan jalan dengan kondisi rusak berat.

Pada akhir tahun 2023, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 393.343 kendaraan, baik kendaraan bukan umum, umum, maupun kendaraan dinas. Dari jumlah kendaraan tersebut, 89,20 persen kendaraan di Provinsi Kalimantan Utara adalah sepeda motor (termasuk sepeda motor roda dua dan roda tiga baik kendaraan bukan umum, umum, maupun kendaraan dinas).

### **Komunikasi**

Kantor Pos adalah tempat pemberi pelayanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.

Jumlah kantor pos pembantu di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 sebanyak 24 unit. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Kota Tarakan memiliki jumlah kantor pos pembantu terbanyak yaitu sebesar 8 unit. Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten yang memiliki jumlah kantor pos pembantu terbanyak kedua, yaitu 7 unit. Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan, masing-masing memiliki jumlah kantor pos pembantu sebanyak 4 unit. Sementara Kabupaten Tana Tidung memiliki 1 unit kantor pos pembantu.

## **1.1.10 Perbankan, Koperasi dan Harga- Harga**

### **Harga**

Pada tahun 2023, Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kalimantan Utara (gabungan Kota Tarakan dan Tanjung Selor) adalah 114,07. Laju inflasi Provinsi Kalimantan Utara (gabungan Kota Tarakan dan Tanjung Selor) dari Bulan Januari hingga Desember 2023 (inflasi kalender Desember 2023) mencapai 2,44 persen dengan inflasi pada bulan Desember sebesar 0,50 persen. Selama tahun 2023, inflasi bulanan tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara (gabungan Kota Tarakan dan Tanjung Selor) terjadi di bulan April 2023, yaitu 0,57 persen serta deflasi terdalam terjadi pada bulan Mei 2023, yaitu -0,15 persen.

Kota Tarakan mengalami laju inflasi sebesar 2,46 persen dari rentan bulan Januari hingga bulan Desember 2023 serta dengan inflasi pada bulan Desember sebesar 0,47 persen. Sementara itu, Tanjung Selor mengalami laju inflasi sebesar 2,38 persen dari rentan bulan Januari hingga bulan Desember 2023 serta dengan inflasi pada bulan Desember sebesar 0,62 persen.

Di wilayah perdesaan, Kondisi Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 menunjukkan nilai di atas 100 Besar NTP tertinggi pada tahun 2023 terjadi pada bulan Februari yang mencapai 113,47 sementara yang terendah terjadi pada bulan Juli senilai 111,05. Dibandingkan tahun 2022, kondisi NTP pada tahun 2023 tergolong mengalami perbaikan. Pada tahun 2022, besaran NTP tertinggi mencapai 110,94 yang terjadi di bulan April 2022.

Sementara besaran NTP terendah pada tahun 2022 terjadi pada Bulan Juli 2022 senilai 105,68.

### **Perbankan dan Koperasi**

Di sektor perbankan pada tahun 2023, tercatat di Provinsi Kalimantan Utara terdapat 12 Bank Swasta Nasional serta 4 Bank Swasta Nasional berbasis Syariah. Selain itu juga terdapat 45 Bank Persero serta 66 Bank Pembangunan Daerah.

Jumlah koperasi di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 2023 tercatat sejumlah 97 unit koperasi dengan berbagai jenis usaha. Sementara Koperasi Unit Desa di Provinsi Kalimantan Utara tercatat sejumlah 9 unit. Jumlah anggota koperasi juga mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah koperasi. Pada tahun 2023 tercatat sejumlah 23.875 orang anggota koperasi di Provinsi Kalimantan Utara yang didominasi oleh laki-laki.

#### **1.1.11 Pengeluaran Penduduk**

Pada tahun 2023, 44,94 persen penduduk di Provinsi Kalimantan Utara adalah penduduk dengan golongan pengeluaran perkapita sebulan Rp 1.500.000,00 ke atas, sedangkan 3,89 persen adalah penduduk dengan golongan pengeluaran Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 749.999,00.

Dirinci menurut kelompok komoditas, 47,31 persen dari pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Kalimantan Utara adalah pengeluaran untuk makanan dan 52,69 persen dari pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Kalimantan Utara adalah pengeluaran untuk bukan makanan. Jika dilihat menurut kelompok makanan, 13,45 persen dari pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi.

Jika dilihat menurut kelompok bukan makanan, 30,06 persen dari pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah pengeluaran rata-rata untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Pengeluaran per kapita sebulan kelompok bukan makanan terbesar kedua adalah kelompok aneka barang dan jasa mencapai 11,56 persen.

#### **1.1.12 Perdagangan Luar Negeri**

##### **Ekspor**

Pada tahun 2023, volume ekspor di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 34.640.512,11 ton dengan nilai ekspor sebesar 2.861.767.724,00 US\$. Terjadi kenaikan volume ekspor sebesar 45,02 persen bila dibandingkan dengan volume ekspor tahun sebelumnya dan terjadi kenaikan nilai ekspor sebesar 7,07 persen bila dibandingkan dengan nilai ekspor tahun sebelumnya. Sebesar 99,69 persen (34.532.538,86 ton) volume ekspor Provinsi Kalimantan Utara merupakan ekspor untuk komoditas bahan bakar mineral, minyak dan produk sulingannya; zat mengandung bitumen; malam mineral, dengan nilai ekspor mencapai 2.511.360.405,00 US\$ pada tahun 2023. Terjadi kenaikan volume ekspor untuk komoditas ini yang mencapai 48,24 persen (volume ekspor dari

23.294.585,50 ton di tahun 2022 menjadi 34.532.538,86 ton di tahun 2023). Untuk komoditas tersebut, terjadi kenaikan nilai ekspor mencapai 7,03 persen (nilai ekspor dari 2.346.415.612,00 US\$ di tahun 2022 menjadi 2.511.360.405,00 di tahun 2023).

### **Impor**

Pada tahun 2023, volume impor di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 618.210,10 ton dengan nilai impor sebesar 688.555.972,00 US\$. Terjadi kenaikan volume impor sebesar 347,06 persen dan peningkatan nilai impor sebesar 302,92 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebesar 71,55 persen (442.316,66 ton) volume impor Provinsi Kalimantan Utara berasal dari Negara Cambodia dengan nilai impor mencapai 8.621.077,00 US\$ pada tahun 2023. Selanjutnya 20,86 persen (128.981,83 ton) volume impor Provinsi Kalimantan Utara berasal dari Negara Singapura dengan nilai impor mencapai 494.420.293,00 US\$.

## **1.1.13 Sistem Neraca Nasional**

### **Produk Domestik Regional Bruto Provinsi**

Pada tahun 2023, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 147,28 triliun rupiah dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK 2010) mencapai 69,82 triliun rupiah.

Dilihat dari distribusi persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha, pada tahun 2023, sebesar 36,18 persen merupakan distribusi tertinggi pada PDRB ADHB di Provinsi Kalimantan Utara. Distribusi tertinggi tersebut adalah distribusi dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Tiga distribusi tertinggi lainnya pada PDRB ADHB tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Utara adalah pertanian, kehutanan dan perikanan (14,23 persen); konstruksi (11,45 persen); dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (11,60 persen).

Laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 tumbuh 4,94 persen. Laju pertumbuhan tertinggi bila dilihat menurut lapangan usaha di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah Pengadaan Listrik dan Gas (18,58 persen), diikuti oleh Jasa Keuangan dan Asuransi (12,38 persen) serta Konstruksi (8,24 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan/Minum (8,24 persen).

Dilihat dari sisi pengeluaran, net ekspor barang dan jasa merupakan komponen jenis pengeluaran dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 yang mencapai 79,53 triliun rupiah. Tiga komponen pengeluaran dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tertinggi berikutnya adalah pembentukan modal tetap bruto (38,32 triliun rupiah), pengeluaran konsumsi rumah tangga (19,65 triliun rupiah) dan pengeluaran konsumsi pemerintah (8,47 triliun rupiah).

### **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah PDRB Kota Tarakan yang mencapai 52,08 triliun rupiah untuk PDRB atas dasar harga berlaku dan 25,65 triliun rupiah untuk PDRB atas dasar harga konstan 2010, diikuti oleh Kabupaten Nunukan (42,52 triliun rupiah untuk PDRB ADHB dan 17,91 triliun rupiah untuk PDRB ADHK 2010) dan Kabupaten Bulungan (25,58 triliun rupiah untuk PDRB ADHB dan 13,18 triliun rupiah untuk PDRB ADHK 2010).

Pada tahun 2023, Kota Tarakan menjadi kota di Provinsi Kalimantan Utara dengan persentase kontribusi tertinggi terhadap jumlah PDRB seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 yang mencapai 35,27 persen. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Nunukan (28,80 persen) dan Kabupaten Bulungan (17,32 persen).

Pada tahun 2023, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tertinggi adalah Kabupaten Tana Tidung dengan nilai PDRB per kapita ADHB mencapai 328,40 juta rupiah. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Malinau (215,62 juta rupiah) dan Kota Tarakan (207,42 juta rupiah).

#### **1.1.14 Perbandingan Antar Provinsi**

Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu bagian dari akselerasi pembangunan nasional utamanya dalam meningkatkan pemerataan capaian pembangunan hingga wilayah perbatasan Negara. Sebagai wilayah yang memiliki perbatasan dengan Negara Malaysia, pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sudah cukup memiliki daya saing dimana berbagai hasil positif pembangunan telah diwujudkan.

Jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Indonesia adalah 278.696,2 ribu penduduk. Jumlah penduduk tertinggi menurut provinsi di Indonesia tahun 2023 adalah jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat yang mencapai 49.860,3 ribu penduduk, sedangkan jumlah penduduk terendah di Indonesia adalah jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara yang mencapai 730,0 ribu penduduk.

Pada tahun 2023, Provinsi dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDB ADHK 2010) tertinggi adalah Provinsi Maluku Utara, yaitu 20,49 persen. Untuk Provinsi Kalimantan Utara, laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 tumbuh sebesar 4,94 persen. Pada kondisi Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Pada kondisi Maret tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 25.898,55 ribu penduduk dan pada kondisi Maret tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26.161,16 ribu penduduk. Jumlah penduduk miskin tertinggi bila dirinci menurut provinsi di Indonesia pada kondisi Maret 2023 adalah jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, yaitu 4.118,81 ribu penduduk. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 47,97 ribu penduduk.

## 1.2 Capaian Provinsi dari Berbagai Indeks

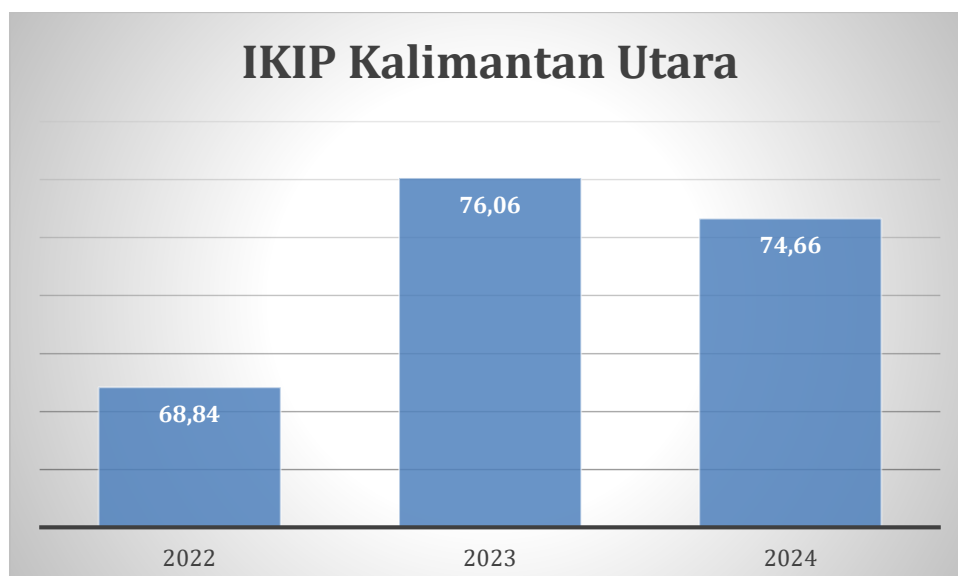
### 1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



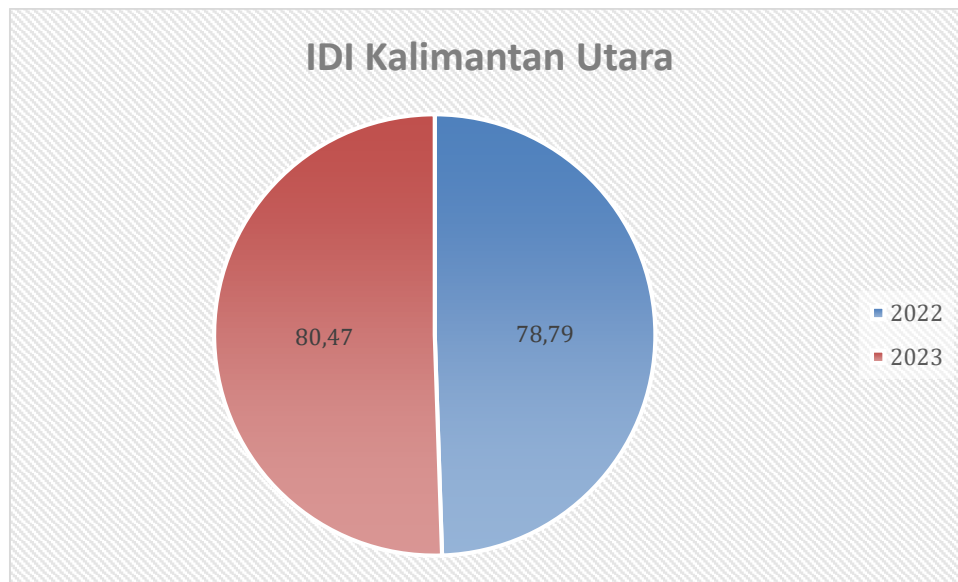
Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020–2024 kian mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, IPM Provinsi Kalimantan Utara mencapai 73,41. Terjadi peningkatan 0,53 poin atau 0,73 persen jika dibandingkan dengan IPM pada tahun 2023 sebesar 72,88.

### 1.2.2 Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan dari 76,06 pada tahun 2023 menjadi 74,66 pada tahun 2024. Penurunan ini membuat Kalimantan Utara turun dari peringkat ke-19 nasional menjadi peringkat ke-20. IKIP tahun 2024 dilakukan untuk menilai keterbukaan informasi publik pada tahun sebelumnya.



### 1.2.3 Indeks Demokrasi Indonesia

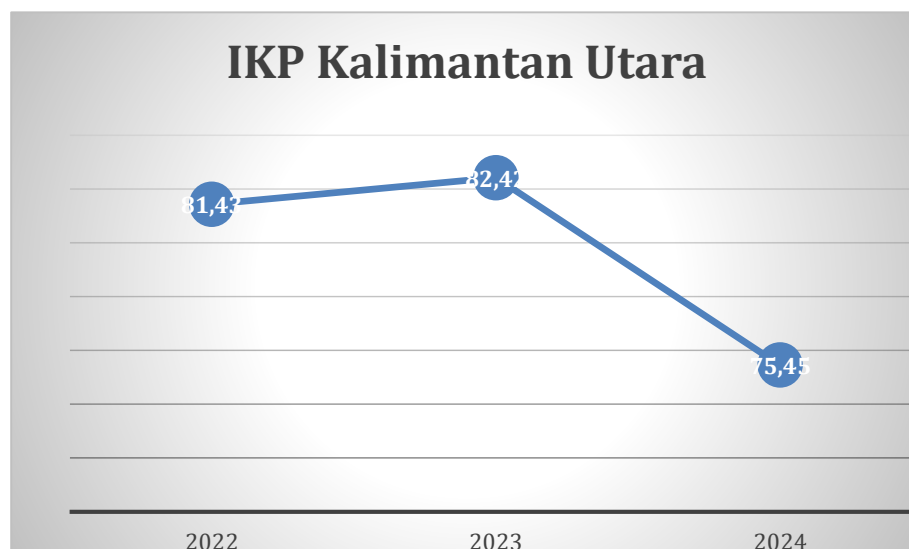


Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Utara meningkat dari 78,79 pada 2022 menjadi 80,47 pada 2023. Dengan peningkatan ini, Kalimantan Utara berada di posisi ke-9 secara nasional dan masuk pada zona High Performing Democracy (Demokrasi Berkinerja Tinggi).

Sebelumnya, Kaltara pada tahun 2022 berada pada zona demokrasi berkinerja sedang (Medium Performing Democracy).

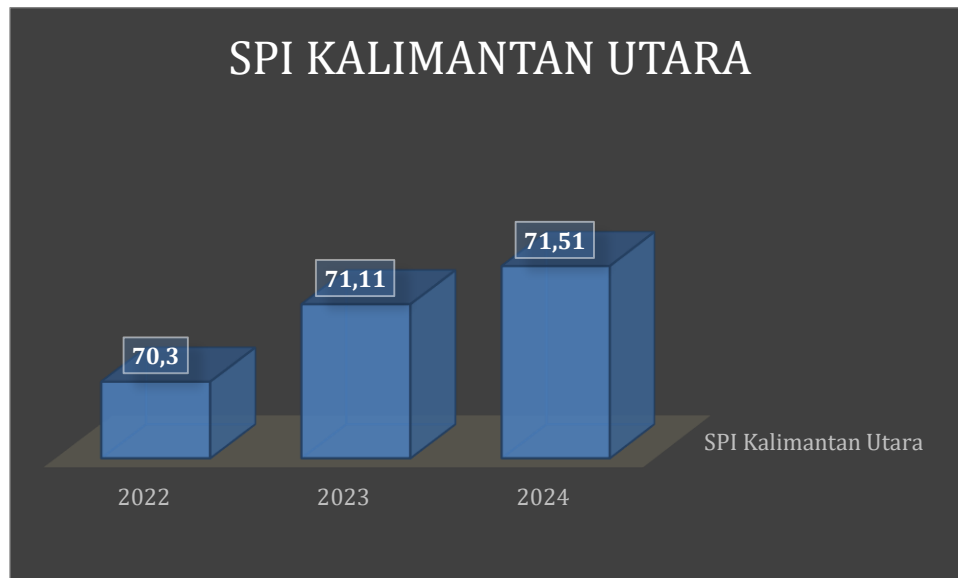
Hanya ada 11 provinsi di Indonesia yang berada pada zona hijau ini, salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Utara. Peningkatan ini didukung dengan meningkatnya aspek kebebasan dan aspek kesetaraan, sedangkan aspek kapasitas lembaga demokrasi mengalami penurunan. Aspek kebebasan mengukur proses sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial.

### 1.2.4 Indeks Kebebasan Pers



Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara adalah 75,45, mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan tahun 2023 sebesar 82,42. Padahal pada tahun sebelumnya, IKP mengalami kenaikan dari 81,43.

#### 1.2.5 Survei Penilaian Integritas



Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, skor SPI 2024 Kalimantan Utara meningkat menjadi 71,51, naik dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 71,11. Kalimantan Utara berada pada urutan 9 dari seluruh provinsi di Indonesia.

#### 1.2.6 Indeks Kebahagiaan

Provinsi Kalimantan Utara berada pada peringkat kedua, dengan skors Indeks Kebahagiaan sebesar 76,33. Angka ini hanya terpaut 0,1 dari Maluku Utara yang berada pada peringkat teratas.

Dalam laporannya disebutkan, BPS mengukur kebahagiaan masyarakat suatu provinsi untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan terkait kebijakan publik dan pembangunan nasional.

Survei dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Metode pengukurannya berdasarkan tiga dimensi, yakni kepuasan hidup, perasaan dan makna hidup. Terakhir, BPS mengeluarkan hasil indeks kebahagiaan pada 2021, setelah penghitungan sebelumnya pada 2014 dan 2017.

## BAB II GAMBARAN UMUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

### 2.1 Sasaran Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Sasaran pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 mencakup 221 perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara.

No	Perangkat Daerah	Jumlah
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	30
2	Pemerintah Kabupaten Bulungan	39
3	Pemerintah Kabupaten Malinau	42
4	Pemerintah Kabupaten Nunukan	51
5	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	29
6	Pemerintah Kota Tarakan	30
TOTAL		221

Namun dalam pelaksanaannya, hanya 97 atau 43,9% perangkat daerah yang berpartisipasi.

No	Perangkat Daerah	Jumlah
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	15
2	Pemerintah Kabupaten Bulungan	18
3	Pemerintah Kabupaten Malinau	23
4	Pemerintah Kabupaten Nunukan	14
5	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	10
6	Pemerintah Kota Tarakan	17
TOTAL		97

### 2.2 Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

#### 2.2.1 Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Dari 15 perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, tidak satupun yang memenuhi kualifikasi informatif. Keseluruhan peserta masih berada pada kualifikasi tidak informatif.



No	Kualifikasi	Jumlah Perangkat Daerah
1	Informatif dengan nilai 90-100	0
2	Menuju Informatif dengan nilai 80-89,9	0
3	Cukup Informatif dengan nilai 60-79,9	0
4	Kurang informatif dengan nilai 40-59,9 dan	0
5	Tidak informatif dengan nilai < (kurang dari atau sama dengan) 39,9.	15

Sementara itu dari 15 perangkat daerah yang tidak informatif, tiga perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan peringkat teratas meliputi :

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kualifikasi
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara	37,32	Tidak Informatif
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara	35,63	Tidak Informatif
3	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara	34,23	Tidak Informatif

Berdasarkan *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) yang telah diverifikasi pada e-monev, diketahui masih rendahnya bobot nilai kuesioner pada rata-rata perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dari 100 nilai kuesioner, nilai setiap indikator masing-masing :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebesar 40
2. Informasi Berkala 30
3. Informasi Tersedia Setiap Saat 30

Setelah pembobotan nilai kuesioner yang mencapai 70% dari total skor, nilai tertinggi diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara dengan skor 30,13 sedangkan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.

Nilai presentasi setelah dikonversi menjadi 30% dari total skor, tertinggi diraih Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara yang mencapai 18 dan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

Kalimantan Utara, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.

No	Nama Perangkat Daerah	Kuesioner 70%	Presentasi 30%	Total Skor	Kualifikasi
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara	28,77	8,55	37,32	Tidak Informatif
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara	30,13	5,5	35,63	Tidak Informatif
3	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara	27,73	6,5	34,23	Tidak Informatif
4	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara	25,83	7,8	33,63	Tidak Informatif
5	Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara	14,63	18	32,63	Tidak Informatif
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara	18,69	4,5	23,19	Tidak Informatif
7	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara	16,59	3,75	20,34	Tidak Informatif
8	Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara	7,7	9,45	17,15	Tidak Informatif
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	16,87	0	16,87	Tidak Informatif
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara	11,97	0	11,97	Tidak Informatif
11	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara	11,76	0	11,76	Tidak Informatif
12	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	10,29	0	10,29	Tidak Informatif
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	5,32	4,5	9,82	Tidak Informatif
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara	5,88	1,8	7,68	Tidak Informatif
15	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	0	0	0	Tidak Informatif

### 2.2.2 Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota

Sebanyak 69 perangkat daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara selain Pemerintah Kecamatan, mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024. Dari jumlah peserta dimaksud, tidak satupun yang memenuhi kualifikasi informatif. Sebanyak 3 perangkat daerah memenuhi kualifikasi cukup informatif, 14 perangkat daerah memenuhi kualifikasi kurang informatif dan 52 perangkat daerah dalam kualifikasi tidak informatif.

No	Kualifikasi	Jumlah Perangkat Daerah
1	Informatif dengan nilai 90-100	0
2	Menuju Informatif dengan nilai 80-89,9	0
3	Cukup Informatif dengan nilai 60-79,9	3
4	Kurang informatif dengan nilai 40-59,9 dan	14
5	Tidak informatif dengan nilai < (kurang dari atau sama dengan) 39,9.	52

Lima perangkat daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara yaag berada pada peringkat teratas meliputi :

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kualifikasi
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung	73,4	Cukup Informatif
2	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan	64,33	Cukup Informatif
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan	60,06	Cukup Informatif
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau	57,14	Kurang Informatif
5	Dinas Kesehatan Kota Tarakan	54,67	Kurang Informatif

## Kota Tarakan

Berdasarkan *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) yang telah diverifikasi pada e-monev, diketahui nilai kuesioner sudah cukup baik, pada rata-rata perangkat daerah Pemerintah Kota Tarakan. Dari 100 nilai kuesioner, nilai setiap indikator masing-masing :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebesar 40
2. Informasi Berkala 30
3. Informasi Tersedia Setiap Saat 30

Setelah pembobotan nilai kuesioner yang mencapai 70% dari total skor, nilai tertinggi diraih Dinas Kesehatan Kota Tarakan dengan skor 54,67 sedangkan nilai terendah dengan skor 1,4 diperoleh Sekretariat DPRD Kota Tarakan.

Sedangkan nilai presentasi setelah dikonversi menjadi 30% dari total skor, tertinggi diraih Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan yang mencapai 17,85. Sebanyak 16 perangkat daerah lainnya tidak mengikuti presentasi sehingga mendapatkan nilai 0.

No	Nama Perangkat Daerah	Kuesioner 70%	Presentasi 30%	Total Skor	Kualifikasi
1	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan	46,48	17,85	64,33	Cukup Informatif
2	Dinas Kesehatan Kota Tarakan	54,67	0	54,67	Kurang Informatif
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan	50,89	0	50,89	Kurang Informatif
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan	50,05	0	50,05	Kurang Informatif
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan	48,58	0	48,58	Kurang Informatif
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan	47,53	0	47,53	Kurang Informatif
7	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan	41,65	0	41,65	Kurang Informatif
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan	41,44	0	41,44	Kurang Informatif

9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan	41,44	0	41,44	Kurang Informatif
10	Dinas Perhubungan Kota Tarakan	40,18	0	40,18	Kurang Informatif
11	Sekretariat Daerah Kota Tarakan	38,92	0	38,92	Tidak Informatif
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan	38,92	0	38,92	Tidak Informatif
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan	36,19	0	36,19	Tidak Informatif
14	Inspektorat Kota Tarakan	24,64	0	24,64	Tidak Informatif
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan	13,16	0	13,16	Tidak Informatif
16	Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Pajak Online Kota Tarakan	12,32	0	12,32	Tidak Informatif
17	Sekretariat DPRD Kota Tarakan	1,4	0	1,4	Tidak Informatif

### Kabupaten Tana Tidung

Setelah pembobotan nilai kuesioner yang mencapai 70% dari total skor, nilai tertinggi diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dengan skor 52,85. Sedangkan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung, Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung serta Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung yang hanya 0.

No	Nama Perangkat Daerah	Kuesioner 70%	Presentasi 30%	Total Skor	Kualifikasi
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung	52,85	20,55	73,4	Cukup Informatif
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30,52	14,4	44,92	Kurang Informatif

	dan Litbang Kabupaten Tana Tidung				
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung	30,03	14,55	44,58	Kurang Informatif
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung	27,3	11,25	38,55	Tidak Informatif
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung	0	19,35	19,35	Tidak Informatif
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung	1,96	16,2	18,16	Tidak Informatif
7	Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung	0	15,3	15,3	Tidak Informatif
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung	0	0	0	Tidak Informatif
9	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung	0	0	0	Tidak Informatif

Sementara nilai presentasi setelah dikonversi menjadi 30% dari total skor, tertinggi diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dengan skor 20,55. Sedangkan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung serta Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung.

### **Kabupaten Malinau**

Setelah pembobotan nilai kuesioner yang mencapai 70% dari total skor, nilai tertinggi diraih RSUD Kabupaten Malinau dengan skor 34,79. Sedangkan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau, Inspektorat Kabupaten Malinau, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau serta Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau.

Sementara nilai presentasi setelah dikonversi menjadi 30% dari total skor, tertinggi diraih RSUD Kabupaten Malinau yang mencapai 22,35. Sedangkan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau, Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau, Inspektorat Kabupaten Malinau, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan

Sosial Kabupaten Malinau, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau serta Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau.

No	Nama Perangkat Daerah	Kuesioner 70%	Presentasi 30%	Total Skor	Kualifikasi
1	RSUD Kabupaten Malinau	34,79	22,35	57,14	Kurang Informatif
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau	21,28	18,3	39,58	Tidak Informatif
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Malinau	15,4	17,55	32,95	Tidak Informatif
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Malinau	14,28	15,9	30,18	Tidak Informatif
5	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau	6,44	21,75	28,19	Tidak Informatif
6	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau	13,86	11,55	25,41	Tidak Informatif
7	Dinas Perikanan Kabupaten Malinau	24,15	0	24,15	Tidak Informatif
8	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau	7,56	11,7	19,26	Tidak Informatif
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau	4,2	14,4	18,6	Tidak Informatif
10	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malinau	3,64	12,75	16,39	Tidak Informatif
11	Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau	0	12,3	12,3	Tidak Informatif
12	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau	5,25	0	5,25	Tidak Informatif
13	Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau	4,2	0	4,2	Tidak Informatif
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau	4,2	0	4,2	Tidak Informatif
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau	2,8	0	2,8	Tidak Informatif

16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau	2,24	0	2,24	Tidak Informatif
17	Dinas Pertanian Kabupaten Malinau	1,4	0	1,4	Tidak Informatif
18	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau	0	0	0	Tidak Informatif
19	Inspektorat Kabupaten Malinau	0	0	0	Tidak Informatif
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau	0	0	0	Tidak Informatif
21	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau	0	0	0	Tidak Informatif
22	Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau	0	0	0	Tidak Informatif

### Kabupaten Nunukan

Setelah pembobotan nilai kuesioner yang mencapai 70% dari total skor, tertinggi diraih Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan skor 19,18. Sedangkan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Sementara nilai presentasi setelah dikonversi menjadi 30% dari total skor, tertinggi diraih Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan dengan skor 26,7. Sedangkan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan, Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

No	Nama Perangkat Daerah	Kuesioner 70%	Presentasi 30%	Total Skor	Kualifikasi
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan	17,29	22,65	39,94	Tidak Informatif
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan	8,47	26,7	35,17	Tidak Informatif
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan	1,68	24	25,68	Tidak Informatif
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan	19,18	0	19,18	Tidak Informatif



5	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan	0	15,6	15,6	Tidak Informatif
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan	14,56	0	14,56	Tidak Informatif
7	Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan	10,08	0	10,08	Tidak Informatif
8	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan	0	0	0	Tidak Informatif

### Kabupaten Bulungan

Setelah pembobotan nilai kuesioner yang mencapai 70% dari total skor, tertinggi diraih Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bulungan dengan skor 34,51. Sedangkan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan.

Sementara nilai presentasi setelah dikonversi menjadi 30% dari total skor, tertinggi diraih Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan dengan skor 27,3. Sedangkan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Dinas Sosial Kabupaten Bulungan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulungan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan.

No	Nama Perangkat Daerah	Kuesioner 70%	Presentasi 30%	Total Skor	Kualifikasi
1	Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan	32,76	27,3	60,06	Cukup Informatif
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bulungan	34,51	13,5	48,01	Kurang Informatif
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan	17,57	26,4	43,97	Kurang Informatif
4	Dinas Sosial Kabupaten Bulungan	32,55	0	32,55	Tidak Informatif

5	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan	19,25	12,15	31,4	Tidak Informatif
6	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan	30,45	0	30,45	Tidak Informatif
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulungan	15,33	15	30,33	Tidak Informatif
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan	21,42	0	21,42	Tidak Informatif
9	Dinas Perhubungan	18,13	0	18,13	Tidak Informatif
10	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan	10,36	0	10,36	Tidak Informatif
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulungan	4,2	0	4,2	Tidak Informatif
12	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan	0	0	0	Tidak Informatif
13	Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan	0	0	0	Tidak Informatif

### 2.2.3 Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan

Dari 13 perangkat daerah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Utara, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, tidak satupun yang memenuhi kualifikasi informatif. Sebanyak dua peserta memenuhi kualifikasi kurang informatif sementara 11 sisanya tidak informatif.

No	Kualifikasi	Jumlah Perangkat Daerah
1	Informatif dengan nilai 90-100	0
2	Menuju Informatif dengan nilai 80-89,9	0
3	Cukup Informatif dengan nilai 60-79,9	0
4	Kurang informatif dengan nilai 40-59,9 dan	2
5	Tidak informatif dengan nilai < (kurang dari atau sama dengan) 39,9.	11

Sementara itu, tiga perangkat daerah Pemerintah Kecamatan yang menempati posisi tiga teratas meliputi :

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kualifikasi
1	Kecamatan Lumbis Pansiangan Kabupaten Nunukan	50,61	Kurang Informatif
2	Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan	50,23	Kurang Informatif
3	Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan	30,53	Tidak Informatif

Berdasarkan *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) yang telah diverifikasi pada e-money, diketahui masih rendahnya bobot nilai kuesioner pada rata-rata perangkat daerah Pemerintah Kecamatan di Provinsi Kalimantan Utara. Dari 100 nilai kuesioner, nilai setiap indikator masing-masing :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebesar 40
2. Informasi Berkala 30
3. Informasi Tersedia Setiap Saat 30

Setelah pembobotan nilai kuesioner yang mencapai 70% dari total skor, tertinggi diraih Kecamatan Lumbis Pansiangan Kabupaten Nunukan dengan skor 35,91. Sedangkan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung.

Sedangkan nilai presentasi setelah dikonversi menjadi 30% dari total skor, tertinggi diraih Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan yang mencapai 18,45. Sementara 10 perangkat daerah Pemerintah Kecamatan lainnya, hanya mendapatkan 0 karena tidak melakukan presentasi.

No	Nama Perangkat Daerah	Kuesioner 70%	Presentasi 30%	Total Skor	Kualifikasi
1	Kecamatan Lumbis Pansiangan Kabupaten Nunukan	35,91	14,7	50,61	Kurang Informatif
2	Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan	31,78	18,45	50,23	Kurang Informatif
3	Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan	17,78	12,75	30,53	Tidak Informatif

4	Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan	7,77	0	7,77	Tidak Informatif
5	Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan	16,73	0	16,73	Tidak Informatif
6	Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan	16,45	0	16,45	Tidak Informatif
7	Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau	10,01	0	10,01	Tidak Informatif
8	Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan	6,44	0	6,44	Tidak Informatif
9	Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan	0	0	0	Tidak Informatif
10	Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan	0	0	0	Tidak Informatif
11	Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan	0	0	0	Tidak Informatif
12	Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan	0	0	0	Tidak Informatif
13	Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung	0	0	0	Tidak Informatif

## BAB III PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

### 3.1 Gambaran Umum Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara

#### 3.1.1 Pendahuluan

Tahun 2023 merupakan masa transisi dari anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode 2018- 2022 kepada anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, periode kedua. Dinamika selama proses seleksi hingga pelantikan anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara periode 2023-2027, membuat proses transisi berlangsung cukup panjang. Peralihan yang harusnya berlangsung pada Agustus 2022, baru bisa dilakukan akhir 2023.

Selama proses transisi ini, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dijalankan anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara periode 2018-2022. Perpanjangan masa jabatan mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Komisi Informasi Provinsi.

Proses seleksi anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara periode 2022- 2026 baru berjalan pada Oktober 2022 dan berakhir dengan uji kepatutan dan uji kelayakan di DPRD Kalimantan Utara pada Juli 2023. Namun, pengumuman hasil uji kepatutan dan uji kelayakan inipun harus menunggu waktu yang cukup lama hingga pelantikan anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada 29 Desember 2023.

Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode 2023- 2027 kemudian memilih :

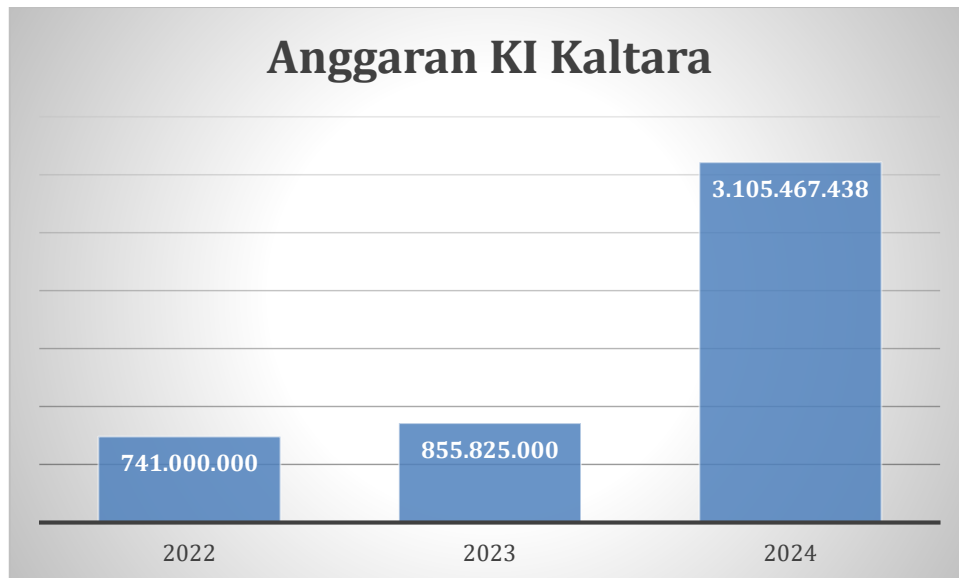
Ketua	:	Fajar Mentari, S.Pd., C.Med
Wakil Ketua	:	Niko Ruru, S.P., C.Med
Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi	:	Berlanta Ginting, S.E., M.Div., C.Med
Bidang Kelembagaan	:	Siti Nuhriyati, S.E., M.Si., C.Med
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Mohamad Isya, S.H., C.Med

Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada 2024 didukung dua pegawai negeri sipil dan enam tenaga honor. Pelaksanaan tugas- tugas Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dilakukan di sekretariat yang berada di Lantai II Kantor Gabungan Dinas 2, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

#### 3.1.2 Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara terus meningkat pada tiga tahun terakhir. Jika tahun 2023 alokasi anggaran mencapai Rp855.825.000, tahun 2024 meningkat menjadi Rp3.105.467.438

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI
2022	Rp741.000.000	
2023	Rp855.825.000	
2024	Rp3.105.467.438	Rp2.979.406.820



### 3.1.2 Uraian Fungsi, Tugas dan Wewenang

#### Fungsi Komisi Informasi Kalimantan Utara

1. Menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya.
2. Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.

#### Tugas Komisi Informasi Kalimantan Utara

1. Menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di provinsi melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi Nonlitigasi;
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan hak atas Informasi Publik;
3. Mendorong Badan Publik untuk memberikan layanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; dan
4. Mengevaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik dan implementasi keterbukaan informasi publik di Badan Publik.

#### Wewenang Komisi Informasi Kalimantan Utara

Kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Tingkat Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Utara.

#### Ruang Lingkup Kerja Komisi Informasi Kalimantan Utara

Ruang lingkup kerja Komisi Informasi Kalimantan Utara mencakup badan publik di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan desa yang ada di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara termasuk instansi vertikal yang berkedudukan di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

## **Pertanggungjawaban Komisi Informasi Kalimantan Utara**

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara dan menyampaikan Laporan tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana tercantum di atas, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menjabarkan kedalam 3 [tiga] bidang program/kegiatan yaitu :

1. Bidang Kelembagaan
2. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
3. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi.

### **Tugas dan Fungsi**

#### **1. Ketua**

Ketua bersama Wakil Ketua bertanggung jawab penuh terhadap seluruh urusan internal maupun eksternal Komisi Informasi Kalimantan Utara

#### **Tugas**

1. Menetapkan Majelis Komisioner dan Mediator maupun Pembantu Mediator untuk penyelesaian sengketa informasi publik;
2. Mengoordinasikan tata kelola organisasi internal dan eksternal Komisi Informasi Kalimantan Utara;
3. Memimpin rapat pleno, rapat kerja Komisi Informasi Kalimantan Utara;
4. Menandatangani surat keluar atas nama Komisi Informasi Kalimantan Utara, keputusan hasil rapat Komisi Informasi Kalimantan Utara, pernyataan resmi tertulis dan perjanjian kerjasama dengan pihak- pihak lain atas nama Komisi Informasi Kalimantan Utara;
5. Mendisposisi surat- surat dinas yang ditujukan kepada bidang dan/atau subkomisi dan Sekretaris Komisi Informasi Kalimantan Utara;
6. Meminta pertanggungjawaban dari masing- masing bidang;
7. Melaksanakan tugas lain sesuai keputusan rapat pleno;

#### **Fungsi**

1. Bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi baik di internal maupun eksternal Komisi Informasi Kalimantan Utara;
2. Mewakili Komisi Informasi di dalam maupun di luar pengadilan;

#### **2. Wakil Ketua**

Ketua bersama Wakil Ketua bertanggung jawab penuh terhadap seluruh urusan internal maupun eksternal Komisi Informasi Kalimantan Utara

#### **Tugas**

1. Menjalankan tugas ketua apabila berhalangan untuk menetapkan Majelis Komisioner dan Mediator maupun Pembantu Mediator untuk penyelesaian sengketa informasi publik;
2. Mengoordinasikan tugas ketua, selama ketua berhalangan sementara;
3. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diputuskan dalam rapat pleno;

### **Fungsi**

1. Koordinator pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik;
2. Mengawasi tugas- tugas sekretariat dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Kalimantan Utara;
3. Koordinator Penyusunan Program Komisi Informasi Kalimantan Utara;
4. Menyiapkan rapat pleno Komisi Informasi Kalimantan Utara;

### **3. Bidang Kelembagaan**

#### **Tugas**

1. Menyiapkan berbagai standar pengelolaan lembaga Komisi Informasi Kalimantan Utara antara lain berupa standar operasional prosedur, pedoman kerja, administrasi, keuangan, sarana prasana dan sumber daya manusia;
2. Melakukan komunikasi, koordinasi dan meningkatkan hubungan antar lembaga dalam kaitannya dengan kegiatan Komisi Informasi Kalimantan Utara maupun kegiatan lainnya;
3. Memperkuat dan memperluas sosialisasi kelembagaan Komisi Informasi Kalimantan Utara ke stakeholder lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah;
4. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Komisi Informasi Kalimantan Utara dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kelembagaan;

#### **Fungsi**

1. Supervisor bagi tim sekretariat dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kelembagaan Komisi Informasi Kalimantan Utara;
2. Pengawas dan evaluator tugas-tugas kelembagaan Komisi Informasi Kalimantan Utara;
3. Fasilitator, katalisator dan dinamisator dalam penguatan hubungan kelembagaan Komisi Informasi Kalimantan Utara dengan stakeholder lainnya;

### **4. Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi**

#### **Tugas**

1. Melakukan tindakan advokasi terkait implementasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik antara permohonan informasi/masyarakat dengan badan publik/pemerintah;
2. Melakukan sosialisasi dalam rangka optimalisasi implementasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh badan publik;
4. Melakukan pendidikan dan penguatan kapasitas stakeholder dalam implementasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik;

#### **Fungsi**

1. Fasilitator dalam peningkatan kapasitas stakeholder dalam memahami dan melaksanakan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Evaluator dan pemantau kinerja badan publik dalam melaksanakan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik;



3. Supervisor bagi badan publik dan masyarakat dalam melaksanakan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Koordinator bagi setiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi, advokasi dan edukasi UU KIP;

### **5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi**

#### **Tugas**

1. Mengoordinasi proses penyelesaian sengketa informasi publik baik melalui adjudikasi dan mediasi;
2. Menjembatani proses konsultasi, koordinasi dan supervisi bagi badan publik dan masyarakat dalam kaitannya dengan teknis penyelesaian sengketa informasi publik;
3. Melakukan penguatan kapasitas lembaga dan staf dalam memfasilitasi proses penyelesaian sengketa informasi publik;

#### **Fungsi**

1. Koordinator teknis dalam proses penyelesaian sengketa informasi;
2. Supervisor bagi badan publik dan masyarakat dalam kerangka penyelesaian sengketa informasi publik;
3. Fasilitator dalam upaya peningkatan kapasitas staf, badan publik dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman proses penyelesaian sengketa informasi publik;

## **3.2 Rencana Strategis 2024- 2029**

#### **Visi**

Mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Utara yang transparan, akuntabel dan inklusif melalui penguatan peran Komisi Informasi dan peningkatan partisipasi publik.

#### **Misi**

1. Meningkatkan literasi masyarakat mengenai hak atas informasi publik melalui program edukasi berkelanjutan.
2. Membangun dan memperkuat kapasitas badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, akurat dan mudah diakses.
3. Memperkuat sistem penyelesaian sengketa informasi yang independen, adil, efisien dan transparan.
4. Meningkatkan partisipasi publik dalam keterbukaan informasi publik di Kalimantan Utara.
5. Memperkuat kelembagaan Komisi Informasi sebagai lembaga yang mandiri, transparan, akuntabel dan inklusif.

#### **Rencana Kerja**

1. Sosialisasi, Bimtek, *Workshop*, FGD Keterbukaan Informasi Publik
2. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara berkelanjutan
3. Meningkatkan layanan informasi publik (PPID) Komisi Informasi Kaltara
4. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi kepada stakeholder dalam memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik

5. Peningkatan kualitas dan profesionalitas dalam penyelesaian sengketa informasi publik
6. Meningkatkan manajemen tata kelola lembaga dan kapasitas SDM

#### **Program Prioritas KI Kaltara 2025**

1. Kolaborasi IKIP
2. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara berkelanjutan

#### **Rencana Kerja Bidang ASE 2025**

1. Sosialisasi dan literasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi dan kabupaten/ kota
2. Bimtek tematik (Layanan Informasi, Penyusunan DIP, Pengujian Konsekuensi dan Penyelesaian Sengketa Informasi).
3. Workshop KIP
4. FGD Keterbukaan Informasi Publik

#### **Rencana Kerja Bidang Kelembagaan 2025**

1. Meningkatkan manajemen tata kelola lembaga dan kapasitas SDM: administrasi (Tata Naskah Dinas), kehumasan dan IT, penyelesaian sengketa.
2. Meningkatkan layanan informasi publik (PPID) Komisi Informasi Kaltara
3. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi kepada stakeholder dalam memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik : Polres, Pengadilan, Wartawan, Ombudsman dan Biro Hukum.

#### **Rencana Kerja Bidang PSI 2025**

1. Bimtek PSI Tematik : Kode etik berhadapan dengan termohon dan pemohon, register permohonan PSI, panitera, MK, penyusunan BAP, berita acara mediasi, berita acara adjudikasi, penyusunan putusan dan persiapan banding.
2. Kunjungan bidang ke Komisi Informasi Provinsi lainnya terkait penyelesaian sengketa informasi publik.

### 3.3 Pelaksanaan Program Prioritas

1. Setelah dilantik Gubernur Kalimantan Utara, Dr (HC) Drs H Zainal Arifin Paliwang SH, MHum pada 29 Desember 2023, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada 5 Januari 2024 melaksanakan rapat pleno untuk memilih ketua dan wakil



ketua. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara kembali menggelar pleno pada 7-8 Mei 2024 yang menetapkan sejumlah keputusan berupa :

- a. Standar Operasional Prosedur Organisasi Komisi Informasi Kalimantan Utara
  - b. Program Kerja Komisi Informasi Tahun 2024
  - c. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Kalimantan Utara
  - d. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara
2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara juga terlibat dalam pelaksanaan Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 melalui Kelompok Kerja Daerah IKIP 2024 yang mulai melaksanakan tugasnya pada Mei 2024.

#### Kelompok Kerja Daerah IKIP 2024 Provinsi Kalimantan Utara

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	Niko Ruru, SP., C. Med	KI Provinsi Kaltara	Ketua
2.	Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med	KI Provinsi Kaltara	Anggota
3.	Asa Zumara, SS	Pemerintah	Anggota
4.	Andri, SE	NGO	Anggota
5.	Maxi Sondakh, SE, M.Si	Dosen	Anggota



### Informan Ahli IKIP 2024 Provinsi Kalimantan Utara

No	Nama	Unsur
1	dr. Seno Aji Wijanarko, MARS, AIFO-K	Pemerintah/ Badan Publik
2	Yuni Satriyani, SE., MAP	Pemerintah/ Badan Publik
3	Syafaruddin, SH	Masyarakat Sipil/ NGO
4	Norjannah, S.Sos	Masyarakat Sipil/ NGO
5	Kartini Maharani Abdul, S.IP., M.Si	Akademisi
6	Cancy Alexiana, S.E., M.Ec.Dev	Akademisi
7	Agus Susanto, S.S	Pelaku Usaha
8	Eka Sukmadewi, S.Sos	Pelaku Usaha
9	Gazalba, S.H	Jurnalis
10	Victor Ratu, S.H	Jurnalis

Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan dari 76,06 pada tahun 2023 menjadi 74,66 pada tahun 2024. Penurunan ini membuat Kalimantan Utara turun dari peringkat ke-19 nasional menjadi peringkat ke- 20. IKIP tahun 2024 dilakukan untuk menilai keterbukaan informasi publik pada tahun sebelumnya.

- Untuk pertama kalinya sejak terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara 2018 lalu, digelar Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang melibatkan 97 perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah kabupaten dan kota serta pemerintah kecamatan. Pelaksanaan kegiatan berlangsung sejak Mei hingga Nopember 2024.





Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang meliputi *launching* dan sosialisasi kepada perangkat daerah, pengisian kuisisioner oleh perangkat daerah, verifikasi kuisisioner, presentasi, visitasi dan penganugerahan serta pendampingan.



4. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara mengirimkan lima komisioner dan seorang staf sekretariat pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional ke-15 Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2024 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 10- 12 Juni 2024.

Pada pelaksanaan kegiatan dimaksud, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara

menyampaikan sejumlah isu aktual seperti korupsi dan keterbukaan informasi di desa, pengaturan sekretariat Komisi Informasi provinsi, kesejahteraan komisioner dan staf sekretariat serta isu keterbukaan informasi pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

5. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada 24 Juli 2024 mengikuti rapat pembahasan anggaran dengan Komisi I DPRD Kalimantan Utara, untuk usulan penambahan pagu anggaran.
6. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara ikut berkolaborasi pada Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa 2024 yang digelar pada Juli-Agustus 2024.
7. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara mengirimkan dua komisioner pada pelaksanaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) ke-13 Komisi Informasi se-Indonesia, yang digelar di Cirebon, Jawa Barat pada 13- 14 September 2024.

8. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara terlibat pada *Focus Group Discussion* Pemilukada yang digelar secara daring oleh Komisi Informasi Pusat pada 1 Oktober 2024.

### 3.4 Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Mengawali tugasnya, pada 29- 31 Januari 2024, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi dan Tata Laksana Persidangan di Kota Tarakan. Kegiatan dimaksud menghadirkan narasumber, Komisioner dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat.



2. Merespon pelaksanaan Pemilihan Umum DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada 2024, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menggelar Workshop Keterbukaan Informasi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan sebagai upaya menyosialisasikan

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan. Kegiatan yang dilaksanakan pada 12 Februari 2024 di Kantor Bupati Nunukan ini diikuti perwakilan partai politik dan organisasi mahasiswa, media maupun PPID instansi yang berkaitan dengan sengketa dimaksud.

3. Untuk peningkatan kapasitas komisioner sebagai mediator saat penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara mengikutsertakan lima komisioner pada Pendidikan dan Pelatihan Mediasi Bersertifikat yang digelar Divisi Mediasi Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada pada 20- 23 Februari 2024 di Yogyakarta.







4. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara mengirimkan empat komisioner dan dua staf sekretariat mengikuti Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat pada 20- 22 Mei 2024 di Bandung, Jawa Barat.

5. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menggelar diskusi uji akses untuk masyarakat sipil guna menyosialisasikan prosedur menyelesaikan sengketa informasi publik.

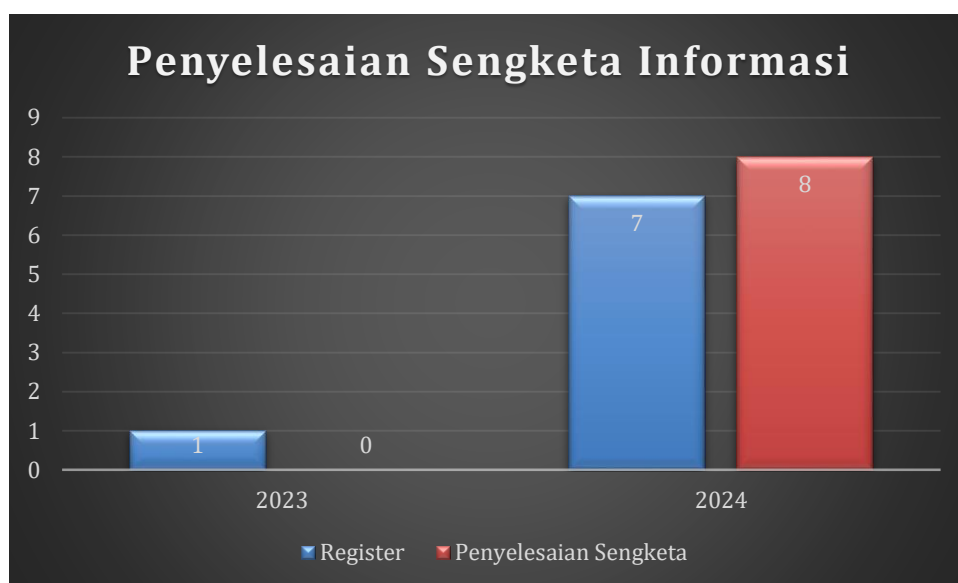


Kegiatan yang dilaksanakan pada 18 Juli 2024 di Lisa Cafe & Restoran ini dikemas dalam Seminar dan Lokakarya Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti oleh Organisasi masyarakat sipil atau Civil Society Organization (CSO) termasuk masyarakat sipil, mahasiswa, dan wartawan.

6. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sebagai narasumber diskusi permohonan dan penyelesaian sengketa informasi publik, atas undangan LSM PLHL Kabupaten Bulungan, pada 6 Agustus 2024.



7. Pada tahun 2024, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menyelesaikan tunggakan satu kasus tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun yang sama Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menerima sekaligus menyelesaikan 7 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.



No	Register	Pemohon	Termohon	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Status
1	001/II/KI KALTARA-PS/2023	Mesran	Inspektorat Kabupaten Bulungan	29 Februari 2024	Tidak Dapat Diterima	Inkracht
2	001/VI/KI KALTARA-PS/2024	dr Bartolomius Silvanus Ling	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan	21 Agustus 2024	Kabul	Inkracht
3	002/VI/KI KALTARA-PS/2024	Mesran	Inspektorat Kabupaten Bulungan	27 Agustus 2024	Kabul sebagian	Inkracht
4	003/VI/KI KALTARA-PS/2024	Mesran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan	2 Agustus 2024	Kabul Sebagian	Inkracht
5	004/II/KI KALTARA-PS/2024	Darwis	PDAM Tirta Taka Kabupaten Nunukan	25 September 2024		Mediasi
6	005/II/KI KALTARA-PS/2024	Darwis	PPID Pemerintah Kabupaten Nunukan	25 September 2024	Tidak Dapat Diterima	Inkracht



7	006/VIII/KI KALTARA- PS/2024	Wastaman	PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bulungan	19 Desember 2024	Kabul Sebagian	Keberatan
8	007/VIII/KI KALTARA-	Wastaman	PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	19 Desember 2024	Kabul	Keberatan



8. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan supervisi pelaksanaan putusan sidang singketa informasi publik ke PDAM Kabupaten Nunukan, pada 10 Desember 2024.

### 3.5 Bidang Kelembagaan

1. Lima komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara didampingi Sekretaris dan dua staf sekretariat melakukan orientasi fungsi, tugas dan wewenang selama tiga hari masing- masing ke Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, PPID Kementerian Informasi dan Komunikasi serta Komisi Informasi Provinsi Banten pada 16- 18 Januari 2024.





2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara melibatkan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, pada 4 Juni 2024 di Kota Tarakan. Selain itu, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara juga dilibatkan sebagai penilai pada kegiatan dimaksud.

3. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dilibatkan pada diskusi Internalisasi Informasi Publik BPJS Cabang Tarakan pada 25 Juni 2024.

4. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan visitasi keterbukaan informasi publik ke Kantor KPU Kabupaten Nunukan pada 9 Agustus 2024. Kegiatan ini juga sekaligus untuk menyosialisasikan rencana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang akan melibatkan penyelenggara pemilihan umum.



5. Untuk mendukung keterbukaan informasi saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah- Wakil Daerah di Kalimantan Utara termasuk kabupaten dan kota, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan sejumlah kegiatan seperti :

- a. Melaksanakan visitasi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Utara pada September 2024.
- b. Melaksanakan visitasi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan pada 1 Oktober 2024.
- c. Melaksanakan visitasi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung pada 3-4 Oktober 2024.

- d. Melaksanakan visitasi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau pada 10- 11 Oktober 2024.
- e. Melaksanakan visitasi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan pada Oktober 2024
- f. Melaksanakan visitasi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan pada 14- 15 Oktober 2024.
- g. Menggelar Media Breafing dan Penandatanganan MoU antara Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan pada 12 Nopember 2024 di Nunukan.
- h. Dialog Keterbukaan Informasi Publik terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah- Wakil Kepala Daerah di RRI Nunukan pada 20 Nopember 2024.



- 6. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung keterbukaan informasi Pemilihan Umum Kepala Daerah- Wakil kepala Daerah di Kabupaten Nunukan, menyampaikan materi keterbukaan informasi publik pada debat pertama calon Bupati- Wakil Bupati Kabupaten Nunukan.
- 7. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara juga menghadiri undangan debat calon kepala daerah- wakil kepala daerah yaitu :
  - a. Debat Pertama Calon Gubernur- Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan pada 9 Oktober 2024.
  - b. Debat Kedua Calon Gubernur- Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta pada 21 Oktober 2024.
  - c. Debat Pertama Calon Bupati- Wakil Bupati Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor pada 23 Oktober 2024.
  - d. Debat Pertama Calon Bupati- Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung di Jakarta pada 25 Oktober 2024.
  - e. Debat Pertama Calon Bupati - Wakil Bupati Kabupaten Nunukan di Jakarta, 6 November 2024.



- f. Debat Ketiga Calon Gubernur- Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor pada 7 Nopember 2024.
- g. Debat Kedua Calon Bupati- Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung di Jakarta pada 11 Nopember 2024.
- h. Debat Kedua Calon Bupati – Wakil Bupati Nunukan di Nunukan pada 11 Nopember 2024.
- i. Debat Kedua Calon Bupati- Wakil Bupati Bulungan di Studio Metro TV Jakarta, 16 November 2024.



- 8. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Lokakarya



Penyusunan  
Rencana  
Strategis  
Komisi  
Informasi  
Provinsi  
Kalimantan  
Utara Tahun  
2024- 2029  
pada 29- 30  
Oktober 2024  
di Tanjung  
Selor.

- 9. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada 30- 31 Oktober 2024.
- 10. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada 31 Oktober 2024 di Tanjung Selor.

11. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Jawa Barat pada 14 Nopember 2024.



### 3.6 Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi

1. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik Desa di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan pada 3 Maret 2024.





2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan pada 27 Maret 2024.



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Hambatan- Hambatan**

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia sekretariat terutama dalam pengelolaan program maupun pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi publik.
2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki ruang sidang permanen sehingga harus menyesuaikan penggunaan ruangan milik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kalimantan Utara.

### **4.2 Kesimpulan**

1. Secara umum, keterbukaan informasi publik di Kalimantan Utara masih pada posisi rendah hingga menengah. Hal tersebut diukur dari Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2024.
2. Terjadi peningkatan dukungan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berdampak positif pada peningkatan kinerja Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024.
3. Secara umum, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan kuantitas maupun kualitas kinerjanya baik pada penyelesaian sengketa informasi publik, membangun dan mengembangkan kelembagaan secara internal maupun eksternal serta terjadi peningkatan kegiatan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik.

### **4.2 Rekomendasi**

1. Perlu intervensi yang kuat dari para kepala daerah di Provinsi Kalimantan Utara dalam penganggaran, pembentukan PPID di setiap perangkat daerah dan peningkatan pelayanan informasi publik.
2. Perlu dorongan penguatan sumber daya Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara guna mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.
3. Perlunya konsistensi dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.

**Lampiran : Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Januari-Desember 2024**

<b>Waktu</b>	<b>Tempat</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Yang Menghadiri</b>
5 Januari 2024	Kantor Komisi Informasi Kalimantan Utara	Rapat Pleno Pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Bidang- Bidang Komisi Informasi Kalimantan Utara	1. Fajar Mentari, S.Pd 2. Niko Ruru, S.P 3. Mohamad Isya, S.H 4. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si 5. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div
16 Januari 2024	Komisi Informasi Pusat dan PPID Kominfo	Orientasi fungsi, tugas dan wewenang Komisi Informasi	1. Fajar Mentari, S.Pd 2. Niko Ruru, S.P 3. Mohamad Isya, S.H 4. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si 5. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div
17 Januari 2024	Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta		6. Dedy Istiyawan, S.ST.Ars
18 Januari 2024	Komisi Informasi Provinsi Banten		7. Amiruddin
29- 30 Januari 2024	Tarakan Plaza Hotel, Tarakan	Penguatan Kapasitas Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi dan Tata laksana Persidangan	1. Fajar Mentari, S.Pd 2. Niko Ruru, S.P 3. Mohamad Isya, S.H 4. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si 5. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div 6. Dedy Istiyawan, S.ST.Ars 7. Fathul Ulum (Staf Ahli) 8. Syawaluddin (KI Pusat)
12 Februari 2024	Kantor Bupati Nunukan	Workshop Keterbukaan Informasi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan	1. Fajar Mentari, S.Pd. 2. Niko Ruru, S.P 3. Mohamad Isya, S.H 4. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si 5. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div 6. Hermawan Mandala Putra 7. Wahyudi
20- 23 Februari 2024	Divisi Mediasi Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Pendidikan dan Pelatihan Mediasi Bersertifikat	1. Fajar Mentari, S.Pd. 2. Niko Ruru, S.P 3. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si 4. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div
29 Februari 2024	Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara,	Putusan sengketa informasi antara pemohon Mesran dan termohon Inspektorat Kabupaten Bulungan	1. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med. 2. Mohamad Isya, S.H.,C.Med 3. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med
3 Maret 2024	Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan	Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik Desa	1. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med. 2. Niko Ruru, S.P., C.Med. 3. Mohamad Isya, S.H.,C.Med 4. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si. , C.Med 5. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med 6. Amirudddin 7. Bestari Alamsyah 8. Hermawan Mandala Putra
27 Maret 2024	Kantor Bupati Bulungan	Sosialisasi Standar Layanan Informasi	1. Fajar Mentari, S.Pd.,C.Med. 2. Niko Ruru, S.P., C.Med. 3. Mohamad Isya, S.H.,C.Med 4. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si. , C.Med



		Publik bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan	5. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med 6. Nurlaili Muharrimah 7. Wahyudi 8. Amirudddin 9. Datuk Alamsyah Bestari 10. Hermawan Mandala Putra
16-18 April 2024	Pulau Sebatik	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Provinsi Kalimantan Utara	1. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med. 2. Niko Ruru, S.P., C.Med. 3. Mohamad Isya, S.H.,C.Med 4. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si. , C.Med 5. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med 6. Nurlaili Muharrimah 7. Wahyudi 8. Amirudddin 9. Datuk Alamsyah Bestari 10. Hermawan Mandala 11. Fathul Ulum 12. Reno Bima Yudha
19 April 2024	Kantor Kecamatan Sebatik Tengah dan Kantor Kecamatan Sebatik Utara	Sosialisasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	1. Fajar Mentari, S.Pd.,C.Med. 2. Niko Ruru, S.P., C.Med. 3. Mohamad Isya, S.H.,C.Med 4. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si. , C.Med 5. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med 6. Nurlaili Muharrimah 7. Wahyudi 8. Amirudddin 9. Datuk Alamsyah Bestari 10. Hermawan Mandala 11. Fathul Ulum 12. Reno Bima Yudha
7-8 Mei 2024	Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara	Rapat pleno penyusunan dan penetapan  a. Standar Operasional Prosedur Organisasi Komisi Informasi Kalimantan Utara b. Program Kerja Komisi Informasi Tahun 2024 c. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Kalimantan Utara d. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi	1. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med. 2. Niko Ruru, S.P., C.Med. 3. Mohamad Isya, S.H.,C.Med 4. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si., C.Med 5. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div.,C.Med 6. Nurlaili Muharrimah 7. Wahyudi 8. Amirudddin 9. Datuk Alamsyah Bestari 10. Hermawan Mandala

		Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara	
17 Mei 2024	Online Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat	Bimtek Online Tim Verifikator Monev Kaltara 2024	Seluruh komisioner dan staf Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara
20- 22 Mei 2024	Bandung, Jawa Barat	Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1. Mohamad Isya, S.H.,C.Med 2. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si. , C.Med 3. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med 4. Datuk Alamsyah Bestari
20-23 Mei 2024	Jakarta	Bimbingan Teknis bagi PokjaDa IKIP	1. Niko Ruru, S.P 2. Mirdat Wahyu Abdillah, S.Pd
4 Juni 2024	Tarakan	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara	1. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si., C.Med 2. Wahyudi
10- 12 Juni 2024	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Rapat Koordinasi Nasional ke15 Komisi Informasi se- Indonesia Tahun 2024	1. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med. 2. Niko Ruru, S.P., C.Med. 3. Mohamad Isya, S.H.,C.Med 4. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si. , C.Med 5. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med 6. Amirudddin
20 Juni 2024	Tarakan	FGD PokjDa IKIP 2024 di Tarakan	1. Niko Ruru, S.P., C.Med. 2. Berlanta Ginting S.E.,M.Div., C.Med 3. Mirdat Wahyu Abdillah
25 Juni 2024	Tanjung Selor	Internalisasi Informasi Publik BPJS Cabang Tarakan	1. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div.,C.Med 2. Wahyudi
1 Juli 2024	Lantai V, Command Center Gedung Gabungan Dinas II.	Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dengan Pemohon Mesran dengan Termohon Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bulungan	1. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med. 2. Niko Ruru, S.P., C.Med. 3. Mohamad Isya, S.H.,C.Med 4. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si. , C.Med 5. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med 6. Nurlaili Muharrimah 7. Wahyudi 8. Amirudddin 9. Datuk Alamsyah Bestari 10. Hermawan Mandala 11. Mirdat Wahyu Abdillah 12. Pemohon Mesran 13. Termoho n PUPR Kab. Bulungan
			1. Fajar Mentari, S.Pd.,C.Med. 2. Niko Ruru, S.P., C.Med. 3. Mohamad Isya, S.H.,C.Med 4. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si. , C.Med 5. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div.,C.Med

		Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dengan Pemohon Mesran dan Termohon Inspektorat Kabupaten Bulungan	6. Nurlaili Muharrimah 7. Wahyudi 8. Amirudddin 9. Datuk Alamsyah Bestari 10. Hermawan Mandala 11. Mirdat Wahyu Abdillah 12. Pemohon Mesran 13. Termohon Inspektorat Kab. Bulungan
		Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dengan Pemohon dr. Bartolomius Silvanus Laing dengan Termohon Badan Pertanahan Nasional Kabupaten (BPN) Bulungan	1. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med. 2. Niko Ruru, S.P., C.Med. 3. Mohamad Isya, S.H.,C.Med 4. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si.,C.Med 5. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div.,C.Med 6. Nurlaili Muharrimah 7. Wahyudi 8. Amirudddin 9. Datuk Alamsyah Bestari 10. Hermawan Mandala 11. Mirdat Wahyu Abdillah 12. Pemohon Bartolomius Silvanus L 13. Termohon BPN. Kab. Bulungan
2 Juli 2024	Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara	Koordinasi PokjaDa IKIP dan Informan Ahli IKIP Kalimantan Utara	1. Niko Ruru, S.P., C.Med. 2. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div.,C.Med 3. Nurlaili Muharrimah 4. Wahyudi 5. Amirudddin 6. Datuk Alamsyah Bestari 7. Hermawan Mandala Putra 8. Mirdat Wahyu Abdillah
4 Juli 2024	Nunukan	Sosialisasi dan Bimtek Pengisian Kuesioner Monev di Nunukan	1. Niko Ruru, S.P., C.Med. 2. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med 3. Datuk Bestari Alamsyah 4. Hermawan Mandala Putra
8 Juli 2024	Tarakan	Sosialisasi dan Bimtek Pengisian Kuesioner Monev di Tarakan	1. Niko Ruru, S.P., C.Med. 2. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med 3. Datuk Bestari Alamsyah 4. Hermawan Mandala Putra
15 Juli 2024	Online Komisi Informasi Pusat	<i>Zoom meeting</i> Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa	Seluruh komisioner dan staf Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara
18 Juli 2024	Lisa Cafe & Restoran	Seminar dan Lokakarya Keterbukaan Informasi Publik	1. Fajar Mentari, S.Pd.,C.Med. 2. Niko Ruru, S.P., C.Med. 3. Irma Santi Napitupulu 4. Fransiskus Jefri 5. Datuk Alamsyah Bestari 6. Mirdat Wahyu Abdillah
24 Juli 2024	Tarakan	Rapat pembahasan anggaran dengan Komisi I DPRD Kalimantan Utara	1. Niko Ruru, S.P., C.Med 2. Mohamad Isya, S.H.,C.Med

29- 30 Juli 2024	Command Center DKISP Kalimantan Utara	Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dengan agenda pembuktian Pemohon Mesran, Termohon Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan	1. Niko Ruru, S.P., C.Med. 2. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med 3. Mohamad Isya, S.H.,C.Med
31 Juli 2024	Command Center DKISP Kalimantan Utara	Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dengan agenda pembuktian dr Bartolomius Silvanus, Termohon Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan	1. Niko Ruru, S.P., C.Med. 2. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med 3. Mohamad Isya, S.H.,C.Med
2 Agustus 2024	Command Center DKISP Kalimantan Utara	Pembacaan putusan sengketa informasi publik Pemohon Mesran vs Termohon Dinas PUPR Kabupaten Bulungan	1. Niko Ruru, S.P., C.Med. 2. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med 3. Mohamad Isya, S.H.,C.Med
6 Agustus 2024	Sekretariat LSM PLHL Kabupaten Bulungan	Diskusi Permohonan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1. Niko Ruru, S.P., C.Med 2. Datuk Alamsyah Bestari 3. Mirdat Wahyu Abdillah
	Tanjung Selor	Focus Group Discussion Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2024 Provinsi Kalimantan Utara	1. Niko Ruru, S.P., C.Med. 2. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med 3. Mirdat Wahyu Abdillah
7 Agustus 2024	Command Center DKISP Kalimantan Utara	Sidang pembuktian sengketa informasi publik dengan Pemohon dr Bartolomius dan Termohon Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan	1. Niko Ruru, S.P.,C.Med 2. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si. , C.Med 3. Mohamad Isya, S.H.,C.Med
9 Agustus 2024	Kantor KPU Kabupaten Nunukan	Visitasi keterbukaan informasi publik	1. Niko Ruru, S.P., C.Med 2. Datuk Alamsyah Bestari
	Online Komisi Informasi Pusat	Zoom meeting Keterbukaan Informasi Publik Pilkada dengan Komisi Informasi Pusat	Seluruh komisioner dan staf Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara
21 Agustus 2024	Command Center DKISP Kalimantan Utara	Pembacaan putusan sengketa informasi publik dengan Pemohon dr Bartolomius dan Termohon Kantor Pertanahan Kabuoaten Bulungan	1. Niko Ruru, S.P.,C.Med 2. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si. , C.Med 3. Mohamad Isya, S.H.,C.Med

September 2024	Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Utara	Visitasi	1. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med. 2. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si., C.Med 3. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med 4. Amirudddin
9- 10 September 2024	1. Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara 2.Command Center DKISP Kalimantan Utara 3. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kalimantan Utara	Presentasi Peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2024	Seluruh komisioner dan staf sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara
11- 13 September 2024	Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Sebuku	Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2024 di Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Sebuku	1. Niko Ruru, S.P., C.Med. 2. Wahyudi 3. Datuk Alamsyah Bestari 4. Hermawan Mandala Putra 5. Mirdat Wahyu Abdillah
13- 14 September 2024	Cirebon, Jawa Barat	Rapat Kerja Teknis (Rakernis) ke-13 Komisi Informasi se-Indonesia	1. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med 2. Mohamad Isya, S.H.,C.Med
19- 20 September 2024	Sebatik Tengah dan Sebatik Utara	Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2024 di Kecamatan Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Utara	1. Niko Ruru, S.P., C.Med. 2. Wahyudi 3. Datuk Alamsyah Bestari 4. Hermawan Mandala Putra 5. Mirdat Wahyu Abdillah
1 Oktober 2024	<i>Zoom meeting</i> Komisi Informasi Pusat	<i>Focus Discussion Group</i> Pemilukada	Seluruh komisioner dan staf sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara
	Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan	Visitasi	1. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med. 2. Niko Ruru,S.P., C.Med 3. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si. , C.Med 4. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med 5. Datuk Alamsyah Bestari 6. Mirdat Wahyu Abdillah 7. Hermawan Mandala Putra 8. Wahyudi
3-4 Oktober 2024	Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung	Visitasi	1. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med 2. Mohamad Isya, S.H.,C.Med 3. Hermawan Mandala Putra 4. Wiranata Pungki

9 Oktober 2024	Tarakan	Debat Pertama Calon Gubernur- Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara	1. Mohamad Isya, S.H.,C.Med 2. Berlanta Ginting,S.E.,M.Div.,C.Med 3. Amirudddin
10- 11 Oktober 2024	Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau	Visitasi	1. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med 2. Mohamad Isya, S.H.,C.Med 3. Hermawan Mandala Putra 4. Wiranata Pungki
Oktober 2024	Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan	Visitasi	1. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med 2 Mohamad Isya, S.H.,C.Med
14- 15 Oktober 2024	Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan	Visitasi	1. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med 2. Mohamad Isya, S.H.,C.Med 3. Niko Ruru, S.P., C.Med 4. Mirdat Wahyu Abdillah
21 Oktober 2024	Jakarta	Debat Calon Kedua Gubernur- Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara	1. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med. 2. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si., C.Med 3. Datuk Alamsyah Bestari
22 Oktober 2024	Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara	Sidang penyelesaian sengketa informasi, Pemohon Wastawan Termohon PPID Utama Pemkab Bulungan dan Pemohon Wastaman Termohon PPID Utama Pemprov Kalimantan Utara	1. Niko Ruru, S.P., C.Med. 2. Mohamad Isya, S.H.,C.Med 3. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med
23 Oktober 2024	Tanjung Selor	Debat Pertama Calon Bupati- Wakil Bupati Kabupaten Bulungan	1. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med
25 Oktober 2024.	Jakarta	Debat Pertama Calon Bupati- Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung	1. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med 2. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si., C.Med 3. Amiruddin
28 Oktober 2024	Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara	Sidang penyelesaian sengketa informasi, Pemohon Wastawan Termohon PPID Utama Pemkab Bulungan	1. Niko Ruru, S.P., C.Med. 2. Mohamad Isya, S.H.,C.Med 3. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med

29- 30 Oktober 2024	Tanjung Selor	Lokakarya Penyusunan Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024- 2029	1. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med. 2. Niko Ruru, S.P., C.Med. 3. Mohamad Isya, S.H.,C.Med 4. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si. , C.Med 5. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med 6. Nurlaili Muharrimah 7. Wahyudi 8. Amirudddin 9. Datuk Alamsyah Bestari 10. Hermawan Mandala 11. Mirdat Wahyu Abdillah 12. Wiranata
30- 31 Oktober 2024	Tanjung Selor	Bimbingan Teknis Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara	
31 Oktober 2024	Tanjung Selor	Bimbingan Teknis Pengelolaan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara	
25 Oktober 2024.	Jakarta	Debat Pertama Calon Bupati- Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung	1. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med 2. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si., C.Med 3. Amiruddin
5 Nopember 2024	Kantor Bawaslu Kabupaten Nunukan	Koordinasi rencana penandatanganan MoU antara Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dan Bawaslu Kabupaten Nunukan	1. Niko Ruru, S.P., C.Med 2. Datuk Alamsyah Bestari
6 November 2024	Jakarta	Debat Pertama Calon Bupati - Wakil Bupati Kabupaten Nunukan	1. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med 2. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si., C.Med 3. Amiruddin
	RRI Nunukan	Koordinasi rencana dialog radio di RRI Nunukan	1. Niko Ruru, S.P., C.Med 2. Datuk Alamsyah Bestari
7 Nopember 2024	Tanjung Selor	Debat Ketiga Calon Gubernur- Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara	Fajar Mentari, S.Pd., C.Med
11 Nopember 2024	Jakarta	Debat Kedua Calon Bupati- Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung	1. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med 2. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si., C.Med 3. Amiruddin
	Nunukan	Debat Kedua Calon Bupati – Wakil Bupati Nunukan	1. Niko Ruru, S.P., C.Med 2. Wahyudi
12 Nopember 2024	Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan	Media Breafing dan Penandatanganan MoU antara Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan	1. Niko Ruru, S.P., C.Med 2. Wahyudi

14 Nopember 2024	Bandung, Jawa Barat	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Jawa Barat	1. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med 2. Siti Nuhriyati, S.E., M.Si., C.Med 3. Amiruddin
16 November 2024	Jakarta	Debat Kedua Calon Bupati- Wakil Bupati Bulungan	1. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med 2. Mohamad Isya, S.H.,C.Med 3. Amiruddin
20 Nopember 2024	Online RRI Nunukan	Dialog Keterbukaan Informasi Publik terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah- Wakil Kepala Daerah	1. Niko Ruru, S.P., C.Med 2. Datuk Alamsyah Bestari 3. Fajar Mentari, S.Pd., C.Med
21 Nopember 2024	Kantor Bupati Nunukan	Audiensi pelaksanaan Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024	
25 Nopember 2024	Tarakan	Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024	Seluruh komisioner dan staf sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara
2 Desember 2024	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan	Pemeriksaan setempet, sidang sengketa informasi publik Pemohon Wastaman, Termohon PPID Kabupaten Bulungan	1. Niko Ruru, S.P., C.Med. 2. Mohamad Isya, S.H.,C.Med 3. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med
	Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara	Sidang sengketa informasi publik Pemohon Wastaman, Termohon PPID Kalimantan Utara	
9 Desember 2024	Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan	Presentasi hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Persandian Kabupaten Nunukan	1. Niko Ruru, S.P.,C.Med 2. Datuk Alamsyah Bestari
10 Desember 2024	PDAM Kabupaten Nunukan	Supervisi pelaksanaan putusan sidang sengketa informasi publik	
11 Desember 2024	Kantor Camat Sebuku	Presentasi hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Camat Sebuku	
19 Desember 2024	Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara	Pembacaan putusan sengketa informasi publik Pemohon Wastaman, Termohon PPID Kabupaten Bulungan dan Pemohon Wastaman,	1. Niko Ruru, S.P., C.Med. 2. Mohamad Isya, S.H.,C.Med 3. Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med



		Termohon PPID Provinsi Kalimantan Utara	
--	--	---	--